

Buletin

H a b a

Perkotaan dalam Perspektif Sejarah dan Budaya di Aceh dan Sumatera Utara

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Aceh

2020

95

H a b a

Perkotaan dalam Perspektif Sejarah dan Budaya di Aceh dan Sumatera Utara

**No. 95 Th. XXV
Edisi April - Juni 2020**

PELINDUNG

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

DEWAN REDAKSI

Rusjdi Ali Muhammad
Aslam Nur
Mawardi Umar

REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Essi Hermaliza
Agung Suryo Setyantoro
Muhammad Liyansyah
Nurmila Khaira

SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha
Bendahara
Yulhanis
Dandi Hidayat
Ratih Ramadhani
Santi Shartika

ALAMAT REDAKSI

Jl. Tuanku Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651)23226
Email : bpnbaceh@kemdikbud.go.id
Website : <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh>

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dari pembaca 7-10 halaman diketik 2 spasi, Times New Roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga meningkatkan dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepele.

ISSN : 1410 – 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Sejarah

Ritual *Mencendekkan Sapo* (Tradisi Mendirikan Rumah Etnis Singkil)

Wacana

Nasrul Hamdani **Medan: Dari Tempuran ke *Gemeente***

Hasbullah **Sejarah *Indische Kerk*: Rumah Ibadah Non-Islam di Kota Banda Aceh 1911-1977**

Sudirman **Perkembangan Media Cetak di Banda Aceh pada Zaman Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang**

Nurmila Khaira **Kota Banda Aceh: Dari Kota Tradisional menuju Madani**

Agung Suryo Setyantoro **Kota Banda Aceh dan Pedagang Kaki Lima**

Habib Firmansyah, Dharma Kelana Putra, Haryanti Harahap ***Celana Cingkrang*: Antara Radikalisme dan *Trend Fashion* Kaum Pria di Perkotaan**

Joshua Jolly SC. **Tinjauan Historis Sabang sebagai Kota Pelabuhan dan Perdagangan Bebas pada Akhir Abad XIX hingga Pertengahan Abad XX**

Cerita Rakyat

Berru ni Raja Engket Manuk Gurba Sipitu Takal

Pustaka

Samadiyah dalam Studi Etnografi

Cover

Kota Banda Aceh

Tema Haba No. 96 Sejarah dan Tradisi Lisan di Aceh dan Sumatera Utara

PENGANTAR

Redaksi

Kota merupakan salah satu entitas budaya yang tak bisa dilepaskan dari interaksi antar manusia di dalamnya. Dengan berbagai permasalahannya, kota menarik untuk dikaji. Buletin Haba No. 95/2020 ini mengangkat tema “Perkotaan dalam Perspektif Sejarah dan Budaya di Aceh dan Sumatera Utara”.

Redaksi merangkum beberapa tulisan yang membahas tentang kota dengan segala dinamikanya. Kota yang dilihat dari beberapa perspektif mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika di dalamnya. Mulai dari pertumbuhan dan perkembangan kota di setiap masanya hingga sisi-sisi khas yang dimiliki setiap kota yang tentunya memiliki perbedaan antara satu kota dengan kota yang lain.

Sedikit tulisan di Buletin Haba kami harapkan dapat memantik kajian-kajian bertemakan “perkotaan” yang lebih serius di kemudian hari. Harapan kami, tulisan-tulisan yang kami sajikan ini memberikan wawasan tambahan kepada para pembaca dalam menyingkap dan mempelajari permasalahan perkotaan baik dari sisi sejarah maupun budayanya.

Redaksi

RITUAL MENCENDEKKAN SAPO (TRADISI MENDIRIKAN RUMAH ETNIS SINGKIL)

Hampir seluruh karya budaya masyarakat Suku Singkil diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk lisan, sehingga tidak ada data yang jelas dan pasti mengenai kapan karya budaya ini muncul. Namun, masyarakat meyakini bahwa karya budaya *mencendekken sapo* ini sudah ada sejak dulu.

Dalam kehidupan masyarakat Suku Singkil pada zaman dulu diyakini tidak terlepas dari ritual-ritual tertentu. Ritual ini dipercaya dilakukan untuk menjaga kelancaran pendirian rumah dan juga keselamatan rumah tersebut dari awal pendirian sampai di masa yang akan datang.

Dalam perkembangannya, adat *mencendekken sapo* masih dilaksanakan secara turun temurun dan bertahan hingga hari ini, khususnya pada masyarakat Suku Singkil di pedalaman. Desa Teluk Rumbia menjadi salah satu contoh keberlangsungan adat ini. Seluruh masyarakat desa ini masih mempertahankan dan melaksanakan ritual adat ini.

Adat *mencendekken sapo* dimulai ketika seseorang atau sebuah keluarga hendak mendirikan rumah. Sebelum adat ini dilaksanakan sepenuhnya, sang pemilik rumah mempersiapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, utamanya kayu tiang, pasak, papan dan lain-lain.

Peralatan pembangunan tersebut merupakan bahan dasar yang relatif sering digunakan masyarakat Suku Singkil karena masyarakat masih lebih memilih membangun rumah kayu daripada rumah bata.

Setelah peralatan tersebut disiapkan, pemangku hajat kemudian mengundang *sintua* (kepala mukim) atau perangkatnya, kepala desa atau perangkatnya, petugas atau pegawai mesjid

dan tokoh agama di mukim setempat, tetangga terdekat dan keluarga terdekat dari pemangku hajat.

Undangan disampaikan dengan menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan. Selain itu, undangan yang disampaikan kepada *sintua* berarti juga merupakan permohonan izin pemangku hajat untuk mendirikan rumah di wilayah kemukiman yang dipimpin oleh *sintua* tersebut.

Pada hari pelaksanaan ritual *mencendekken sapo*, keluarga terdekat yang diundang datang dengan membawa *nakan gekhsing* (nasi kuning yang dibuat dari beras ketan dan kunyit). Sedangkan tamu undangan lain membawa penganan lain seperti pisang, roti dan kue-kue lainnya. Tamu undangan kemudian berkumpul di tempat pembangunan rumah akan dilaksanakan.

Selanjutnya dilaksanakan pemasangan kerangka rumah dengan memasang pasak, kayu penyangga dan papan lantai. Pada pasak kemudian disematkan kain berwarna merah putih. Filosofi dari pemasangan kain warna merah adalah agar sang pemilik rumah dapat menjadi insan yang dapat memperjuangkan haknya sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai sebuah keluarga secara berani dan bertanggungjawab.

Sementara kain warna putih melambangkan harapan agar sang pemilik rumah menjadi insan yang dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sebagai sebuah keluarga dan bagian dari masyarakat dengan hati yang tulus dan suci, bersih dari prasangka buruk.

Setelah pasak berdiri, baru kemudian dipasangkan tiang rambu-rambu, yaitu tiang depan sebelah kiri dan kanan rumah. Filosofi kain putih ini adalah

sebagai lambang kesucian niat dalam mendirikan rumah, yaitu mendirikan rumah untuk memelihara keluarga dan keturunannya. Kemudian, dipasangkan pula selangsang yang terdiri dari anyaman pandan berbentuk sangkar burung, satu tempat telur ayam dan satu tempat air di dalam botol putih.

Filosofinya sangkar burung dan telur melambangkan agar sang empunya rumah dapat memiliki keturunan yang banyak dan baik, sedangkan air putih melambangkan pengharapan agar mereka yang tinggal di dalamnya berhati sejuk dan tenang.

Selanjutnya dipasangkan pula *mayang pinang* (pinang yang akan mekar) sebanyak satu tandan dan bibit kelapa yang baru tumbuh. Filosofinya agar penghuni rumah selalu dalam keadaan segar. Sedangkan bibit kepala melambangkan harapan agar pemilik rumah diberkahi banyak rezeki.

Setelah tiang rumah berdiri, dipasangkan pula pisang satu tandan untuk dimakan paa saat rumah sudah berdiri. Selain itu dipasang juga payung berwarna hitam sebagai lambang perlindungan bagi keluarga yang menempati rumah tersebut. Berikutnya adalah ritual memotong atau menyembelih ayam. Ayam yang dipotong berjumlah 2 ekor; jantan dan betina. Ayam jantan disembelih di tiang rambu-rambu, sedangkan ayam betina disembelih ditiang lain dekat dengan tiang rambu-rambu.

Jika jatuh bagian kepala yang dipotong tidak dekat tiang, maka diyakini sang pemilik rumah memiliki langkah yang jauh, harus merantau. Sedangkan jika jatuhnya agak jauh dari tiang maka berarti pertanda kebaikan. Filosofi penyembelihan

ayam ini adalah harapan agar tidak ada kejadian berdarah yang terjadi di rumah, cukup darah ayam itu saja yang tumpah.

Acara dilanjutkan dengan prosesi tepung tawar atau pesejuk. Pertama sekali diawali oleh sintua yaitu mukim, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat kemudian ahli famili dan penutup pemilik rumah, pesejuk pertama sekali dilakukan penaburan beras kuning yaitu beras yang diwarnai dengan kunyit. Beras kuning bermakna berkah rizki pemilik rumah, kemudian penaburan *becih* (padi gongseng). Maknanya adalah agar pemilik rumah rezekinya berkembang. *Pesejuk* ini menjadi perlambang agar rumah menjadi dingin, menyenangkan untuk dikunjungi dan para penghuninya dapat hidup tenang dan tentram.

Setelah *pesejuk* selesai selanjutnya khanduri atau makan bersama sebagai lambang terima kasih atas dukungan dan doa sanak famili dan para tetangga yang kemudian diakhiri dengan pendirian rumah. Untuk mendirikan rumah ini diawali dengan azan oleh dua orang. Begitu azan selesai, maka secara bersama-sama rumah didirikan, filosofisnya adalah agar pemilik rumah tetap terbuka hatinya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Ketika rumah sudah berdiri, barulah diselenggarakan doa bersama untuk meminta keselamatan Allah SWT selama proses pembangunan rumah. Diakhir prosesi, pekerja bangunan dipanggil agar proses pembangunan dapat segera dilaksanakan.

Pemiliki rumah kemudian memberikan beras satu bambu, kelapa dua buah dan kain putih 1,5meter kepada pekerja bangunan sebagai tanda ucapan terima kasih dan penghargaan.

MEDAN: DARI TEMPURAN KE *GEMEENTE*

Oleh: Nasrul Hamdani

Pendahuluan

1 Juli 2020 mendatang, kota Medan genap berusia 430 tahun. Seperti tahun-tahun yang sudah lewat, menjelang hingga sesudah “tanggal keramat” itu, media massa di ibu kota Provinsi Sumatera Utara mulai dipenuhi oleh berita tentang pencapaian kota juga kritik warga atas pencapaian itu. Namun rangkaian acara semarak hari jadi kota tahun ini tampaknya bakal batal dihelat karena wabah COVID-19 secara perlahan mulai menular dan menjangkiti sejumlah warga di kota Medan.

Namun tidak banyak orang tahu jika usia 430 tahun itu bermula dari 1971 lalu ditetapkan secara resmi empat tahun sesudahnya. Sebelum 1971 itu, hari jadi kota Medan ditetapkan pada 1 April 1909 berdasarkan penetapan status *gemeente* atas kawasan kota Medan modern yang dirintis De Deli Maatschappij (Deli Mij) sejak memindahkan pusat administrasi dari Labuhan yang terletak di hilir sungai Deli ke kampung bernama Medan Putri antara tahun 1869-1873.

Perubahan hari jadi kota pada 1971 itu bukanlah tanpa alasan. Masa ketika hari jadi awal itu diubah, kota Medan sedang tumbuh pesat bersama geliat industrialisasi. Industrialisasi yang dimulai akhir 1970-an itu tidak cuma menarik urbanisasi yang mengubah komposisi penduduk atau mendorong perluasan kota tetapi turut mengubah pandangan serta citra kota cantik dari masa kolonial dengan ciri Eropa modern yang berdiri di atas tanah Melayu ini.

Risalah ini menggambarkan panorama perkembangan kota Medan dari masa lampau yang “klasik” hingga kota ini sempat didaulat sebagai Parijs van

Sumatra. Perkembangan ini juga menampilkan cerita di balik kesinambungan dan perubahan yang berlangsung di atas kota yang bermula dari tempuran (tempat bertemunya dua sungai) lalu tumbuh pesat sebagai salah kota paling maju dan terkemuka di Hindia Belanda.

Penaklukan Haru dan Kampung Medan Putri

Penetapan 1 Juli 1590 sebagai hari jadi kota Medan disandarkan pada dua peristiwa. Pertama, penaklukan Haru oleh Sultan Alauddin Riayatshah Said al-Mukammil dari Aceh (1589-1604) pada tahun 1590 yang berujung kejatuhan negeri itu. Kedua, pembukaan (kembali) *kuta* di tempuran sungai Deli dan Babura pada 1 Juli oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi sekitar dua dasawarsa setelah kejatuhan Haru.

Serangan Aceh pada 1590 itu menjadi serangan pamungkas yang berhasil mengakhiri sejarah Haru. Aceh yang sejak lama terusik dengan aktivitas perompakan yang dilancarkan Haru¹ ditambah persekutuan negeri itu dengan Johor sesungguhnya telah melancarkan rangkaian serangan ke Kuala Guri sejak 1539. Dalam serangan pertama ini Aceh tidak mampu menembus benteng Haru barulah pada serangan terakhir Haru jatuh dan cerita tentang kejatuhan itu tersimpan sebagai legenda Putri Hijau yang diyakini masyarakat Melayu dan Karo di kawasan itu.

Kemenangan Aceh atas Haru terwujud 51 tahun sesudah serangan pertama. kejatuhan Haru disusul kejatuhan Asahan dan Johor, seteru utama Aceh yang

¹ Armando Z. Cortesão (Ed.), *The Suma*

Serangan pamungkas ini membuat nama Haru lesap. Sempat digantikan sebentar oleh Guri sampai akhirnya tak terdengar lagi terutama ketika Gocah Pahlawan yang kelak menjadi leluhur Sultan Deli dan Serdang, didaulat sebagai Wakil Sultan Aceh untuk menjadi patron di atas bekas daerah kekuasaan Haru yang terletak di antara Tamiang hingga Pasir Ayam Denak di sekitar sungai Rokan masa kini.²

Medan terletak dalam batas-batas Tamiang dan Pasir Ayam Denak ini. Medan disebut sebagai salah satu bandar Haru yang terlindung oleh benteng ber dinding tanah setebal dua lapis di tempuran, tanah yang membentuk seperti delta di pertemuan aliran sungai Babura dan Deli. Menurut cerita, bandar ini pernah dihancurkan armada Aceh dalam serangan-serangan awal, ditinggalkan lalu dihuni kembali dalam jangka waktu yang terbilang panjang.

Di tempat yang juga terlindung oleh pepohonan besar ini terdapat sejumlah makam kuno yang dikeramatkan orang sejak lampau. Di lokasi ini pula ditemukan sejumlah tinggalan peradaban lampau, mulai dari uang Aceh yang menjadi bukti persinggungan dengan adikuasa itu hingga reruntuhan benteng Haru yang digempur Aceh. Inilah kampung Medan yang disebut dalam cerita itu itu, tapak pertama kota Medan masa kolonial hingga kini.

Medan dan Guru Patimpus

Medan yang ditulis dengan ejaan Meidn, Meidan atau Medina secara *totum pro parte* kadang disebutkan dalam konteks yang berhubungan dengan Haru, Guri maupun Deli. Tempat ini tercantum dalam catatan Turki, Persia, Aceh, Tiongkok dan Portugis dengan penggambaran yang persis dengan keadaan sebelum dihancurkan Aceh yaitu kampung yang berada di pertemuan dua aliran sungai

utama di kawasan itu yaitu sungai Babura dan Deli yang berhulu di Deli Tua (pusat kekuasaan Haru) dan bermuara di Belawan.

Catatan asing bertarikh 1539, 1554, 1590, 1823 dan 1889 pun secara eksplisit menyebut keberadaan kampung Medan itu terletak di antara dua aliran sungai yang dapat disusuri dengan perahu dari muara. John Anderson yang melakukan menjalankan misi dagang Inggris pada 1823 menulis di tempat itu ada sebuah *misgit* di pinggir sungai dengan sumur yang dempet dengan dinding masjid.³ Mungkin itulah gambaran masjid yang kelak dikenal sebagai Mesjid Gang Bengkok yang masih berdiri sampai kini.

Penataan kampung Medan pascakejatuhan Haru mulai berlangsung antara 1590-1640. Pada periode transisi ini muncul sosok Guru Patimpus Sembiring Pelawi, putra raja Bekerah yang menolak dirajakan dan memilih mengembara mencari ilmu. Dalam pengembaraan itu, Patimpus berjasa mendamaikan perselisihan di Aji Jahe dan Batu Karang hingga akhirnya ia mendengar ada seorang Jawi berilmu tinggi berdiam di Kota Bangun.

Patimpus dan Datuk Kota Bangun sepakat untuk bertarung mengadu kemampuan dengan perjanjian bahwa siapapun yang kalah akan mengikuti kehendak dan keyakinan pemenang. Singkat cerita, Patimpus tidak mampu mengimbangi ilmu Datuk Kota Bangun. Ia kalah. Menuruti perjanjian iapun memeluk Islam dengan kewajiban mempelajari keyakinan itu dengan baik. Sebelum masuk Jawi ia pulang ke Aji Jahe dan Perbaji untuk menyampaikan komitmen masuk Jawi ini kepada para pengikutnya yang berdiam di sana.

DI Kota Bangun, Patimpus menikah dengan putri cantik anak Raja

² Tengku Luckman Sinar, *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, Medan:Perwira, 2001, hlm. 22.

³ John Anderson, *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971, hlm. 110.

Pulo Brayan, seorang Karo *merga* Tarigan yang lebih dulu menjadi Jawi dan berkuasa atas kawasan itu. Setelah menikah Patimpus membuka dan menata kembali kampung Medan yang strategis dan menjadikannya sebagai *kuta* ke-12 dari urutan kampung-kampung yang dibuka oleh anak-anak pemuka *merga* Sembiring Pelawi yang memerintah *Urung XII* (baca: sepuluh dua) Kuta Hamparan Perak.

Kampung Medan yang dibina Patimpus ini kelak dikenal sebagai Medan Putri. Letaknya persis di atas tapak kampung Medan lama. Dari sinilah Patimpus dan keturunannya meluaskan pengaruh hingga ke bagian hulu sungai Deli. Bagelit, salah satu anaknya menjadi penguasa Sukapiring. Adiknya Hafidz Muda memerintah Pulau Bening. Keturunan Patimpus lain juga membuka *kuta* yang baru antara lain Kuala Bekala, Terjun, Buluh Cina, Klambir dan Pangkalan Buluh. Salah satu keturunannya, Sutan Sri Ahmad didaulat sebagai Datuk Panglima Setia Raja Wazir XII Kuta Hamparan Perak.

Begitulah kampong Medan Putri. Tahun 1823, Anderson menyebut ada kira-kira 200 orang yang tinggal di sini.⁴ J. Nienhuys, perintis perkebunan tembakau Deli yang memindahkan pusat administrasi ke Medan Puteri pada 1879 memandang kampung ini ideal untuk dikembangkan menjadi kota; tanahnya datar, kering dengan sedikit bagian rawa. Inilah alasan ia membangun rumah batu yang megah di Medan Putri. Jalan yang menghubungkan rumahnya dengan jalan utama kelak dinamai jalan Tembakau Deli.

Medan Kolonial

Pengembangan kota Medan tidak bisa dilepaskan dari industri tembakau Deli yang dirintis sejak 1863, ditaksir bernilai ekonomi tinggi pada 1867 dan diikuti ekspansi bisnis De Deli Maatschapij atau biasa ditulis Deli Mij yang meraup laba

dari tembakau. Hampir tak dapat dibantah bahwa sampai tahun 1887, Deli Mij-lah yang merintis pembangunan Medan sebagai kota modern yang sama sekali baru sepenuhnya tanpa kontribusi langsung Batavia, meskipun tapak awalnya mencakup kampung Medan Puteri.

Bidang tanah yang menjadi bagian dari konsesi Mabar-Deli Tua, konsesi Polonia serta kampung-kampung asli yang semula didiami *inhemsee* (penduduk bumiputera) kawula Sultan Deli digunakan sebagai tapak awal pembangunan kota Medan modern bergaya Eropa yang di atasnya kelak didirikan alun-alun (kelak dinamai Esplanade), stasiun dengan kereta api yang spesifikasinya berbeda dengan kereta api pemerintah (Staatspoor) hotel dan semua fasilitas kota dengan standar tinggi Eropa.⁵

Oleh sebab itu, tidak heran apabila fasilitas dasar kota, jaringan jalan, kereta api, rumah sakit berbeda dengan dengan kota-kota lain. Hampir tidak ada pembatasan atas Pun demikian dengan penggunaan mata uang. Uang dari Semenanjung yang disebut *Spanish Dollar*, *Ringgit* burung ataupun *copongs* terus berlaku dan belum termasuk “uang kebon” yang berwujud kupon dengan cap atau koin dengan nominal tertentu yang digunakan untuk gaji para kuli bahkan bahkan ketika *Gulden* telah digunakan.

Inilah wewenang Deli Mij dan perusahaan perkebunan lain di Deli sebelum membagi kewenangan itu pada Batavia yang juga telah memindahkan kedudukan Residen dari Bengkalis ke Medan serta menginisiasi “penegerian” *gemeentefonds* atau badan dana kotapraja yang sudah berdiri sejak 1886 untuk membiayai pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kota oleh konsorsium swasta yang menghimpun dana pengusaha perkebunan.

⁵ Jan Breman, *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli pada Awal Abad Ke-20*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti-KITLV, 1997, hlm. 199.

⁴ *Ibid.*, hlm. 273.

Menjelang 1908, mengikuti klausul UU Desentralisasi dan pembentukan Afdeelingsraad van Deli (Dewan Wilayah Deli) yang sejajar dengan fungsi Negorijraad yang berada dalam kendali Residen dan Asisten Residen Deli serta Cultuurraad yang menjadi dewan bagi daerah-daerah di luar Medan, peluang untuk menjadikan Medan pusat pemerintahan dan perkebunan dengan status *gemeente* makin terbuka dengan pembentukan Gemeenteraad (Dewan Kotapraja) pada 1 April 1909.

Ketua Gemeenteraad yang jadi cikal bakal pemerintahan *gemeente* ini dijabat sementara oleh Asisten Residen E.F.Th. Maier sebelum akhirnya diserahkan kepada Baron Daniel Mackay, yang kelak menjadi Walikota Medan pertama versi 1909 yang ditetapkan pada 1 April 1918. Walikota Medan ini berkuasa secara administratif atas semula empat kampung di Medan lalu bertambah dua, yaitu kampung Kesawan, Sei Rengas, Petisah Hulu, Petisah Hilir ditambah ampung Aur dan kampung Keling.

Masa itu, Medan telah mengambil alih kegiatan di kampung-kampung sekitarnya bahkan mengambil alih peran kota-kota yang berkembang lebih dahulu di sekitarnya. Sebagaimana *these* Kuntowijoyo⁶ sejak tembakau menjadi komoditas primadona, Medan juga telah mengambilalih peran Palembang dan Padang sebagai kota perdagangan di Sumatera. Medan berikut perkembangannya yang sangat cepat itu juga disebut telah mengimbangi Singapura dan Pulau Pinang di seberangnya.⁷

⁶ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, hal. 51.

⁷ Pengantar Taufik Abdullah dalam buku Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta: LP3ES, 1998.

HUT Medan: Mengapa 1590?

Perkembangan Medan sejak 1879 merupakan keniscayaan. Jadi keniscayaan pula bahwa pendorong perkembangan itu adalah Deli Mij, badan usaha swasta yang secara sadar membangun, mengembangkan dan mengambil manfaat dari kota yang mereka bangun tanpa campur tangan pemerintah, meskipun ketika merintis, Nienhuys, sang pendiri Deli Mij mengeluhkan ia dan sejumlah tuan kebon Eropa yang bekerja tanpa perlindungan pemerintah yang berkedudukan di Bengkalis sementara mereka berada di Labuhan.⁸

Penetapan sebagai 1590 hari lahir kota Medan memang memiliki alasan historis. Ada “fakta keras” yang dapat dirujuk yang disandarkan pada pembukaan (kembali) kampung Medan oleh Guru Patimpus. Namun konsep kota dan konteks kekotaan, terlepas dari bagaimana kita mendefinisikan kota dan kekotaan belum sepenuhnya dapat disandarkan pada peristiwa termasuk rentetan peristiwa yang berlangsung di atas kampung Medan dan/atau Medan Putri sepanjang 1590-1879.

Ada mata rantai peristiwa yang belum tersambung dalam kurun hampir 300 tahun itu. Antara lain ialah bagaimana perkembangan Medan sebelum Deli Mij memindahkan pusat administrasinya dari Labuhan Deli yang sesungguhnya telah menjadi kota dalam konteks sebagai *center of networks*. Selain itu nama Medan serta pemahaman yang mengikuti nama ini sering tumpang tindih dengan Deli sebagai entitas kawasan, kebudayaan, politik dan ekonomi sejak perkebunan tembakau dibuka dan meraup laba berlimpah.

Dalam konteks kekotaan, kampung Medan belum menunjukkan “karya terbesar manusia dalam evolusi

⁸ Karl J. Pelzer, Tuan Kebon dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947, Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

peradaban untuk mencapai otonomi diri” seperti dikemukakan Jacques Erlul. Menurut Erlul, ketika kota mulai dibangun, sekelompok manusia mulai melepas sifat barbarinya. Kelompok-kelompok manusia yang berasal dari bermacam latar belakang, identitas dan kepentingan itu juga mampu mengkondisikan kompetisi secara sehat sehingga peradaban kota mencapai tingkat tertinggi melebihi teknologi yang mereka ciptakan sebelumnya.

Penutup

Situasi penciptaan sebuah kawasan menjadi sebuah kota secara empirik dan teoretik dipandang sebagai penciptaan kawasan manusia yang beradab karena adanya jaminan ketenangan dan ketertiban bagi manusia-manusia yang tinggal di dalamnya. Jaminan-jaminan itu diperoleh dari kesepakatan dalam perjanjian-perjanjian (*charter*) yang intinya adalah bersikap saling menghormati hak dan kewajiban warga atas warga lainnya.⁹ Jadi, dalam pengertian di atas penghargaan atas heterogenitas menjadi ciri penting dari sebuah kota.

⁹ Yongki Karman ‘Adab dan Azab Jakarta’ Kompas 21 Juni 2005.

Perubahan hari jadi 1 April 1909 menjadi 1 Juli 1971 harus diakui memang membawa semangat nasional, suatu kecenderungan yang sedang berlangsung masa itu.¹⁰ Namun ada hal baru yang timbul dari industrialisasi yang agaknya diabaikan untuk ditelaah, terutama apakah perubahan penetapan itu berhubungan atau mendorong perubahan itu? Industrialisasi berdampak besar pada penduduk asli, seperti perluasan kota yang meminggirkan penduduk asli ditambah pandangan stereotipik bahwa penduduk asli malas atau tidak suka jadi pekerja upahan secara langsung maupun tidak langsung menjauhkan mereka dari hiruk pikuk kegiatan ekonomi industri.¹¹

¹⁰ Lihat Mahadi, *Hari Jadi dan Perkembangan Sosiologis Kota Medan*, Medan: Fakultas Hukum USU, 1971

¹¹ Lihat buku Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta: LP3ES, 1998.

Nasrul Hamdani, S.S. adalah Peneliti Ahli Pertama
pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

SEJARAH *INDISCHE KERK*: RUMAH IBADAH NON-ISLAM DI KOTA BANDA ACEH 1911-1977

Oleh: Hasbullah

Pendahuluan

Kisah ini menampilkan satu sudut pandang lain dari dinamika perubahan Kota Banda Aceh yang terjadi pada masa lalu akibat adanya politik perang, dan pembangunan kota yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda (HB). Tulisan ini membayangkan wajah Kota Banda Aceh di masa lalu yang memantulkan keniscayaan akan keberagaman pada saat ini.

Berawal maklumat perang dari Hindia Belanda ke pusat istana (*Dalam*) Kesultanan Aceh Darussalam yang kemudian disebut Kutaraja, setelah berhasil direbut dengan serangan bersenjata oleh mereka pada kali kedua. Hal inilah yang kemudian menjadikan kota ini menjadi kota koloni Hindia Belanda sebagai titik punca keberagaman itu.

Sejak Hindia Belanda berhasil merebut Kutaraja dari Kesultanan Aceh Darussalam pada 24 Januari 1874, Hindia Belanda menjadikannya sebagai ibu kota *Atjeh en Onderhoorigheden* atau Wilayah Aceh dan Taklukannya di atas puing pusat Kesultanan Aceh Darussalam yang disebut “*Dalam*”. Mereka pula yang kemudian menciptakan sistem pemerintahan baru yang berbentuk Gubernemen. Berbilang waktu kemudian, istilah Gubernemen berganti, dari Gubernur Militer menjadi Gubernur Sipil yang mengikuti ritme perlawanan rakyat Aceh. Hindia Belanda akhirnya menggiring Aceh ke pemerintahan baru dari apa yang disebut sebagai pemerintahan Residen sejak 1936-1942.

Pascakolonial, tepatnya setelah Republik Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945 di ruang Kutaraja atau Kota

Banda Aceh kisah masih terus berlanjut. Kutaraja pun saat itu menjadi ibu kota Residen Aceh. Sejak 1957, Kutaraja secara resmi menjadi ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada saat yang bersamaan Aceh masih saja bergejolak dalam DI/TII Aceh sampai 1962. Pada saat itu juga sedang terjadi proses pergantian nama kota dari Kutaraja menjadi Kota Banda Aceh.

Dinamika sejarah yang terjadi di ibu kota Aceh dalam kurun waktu yang panjang itu telah melahirkan keberagaman penduduk dan agama yang dianut penduduk di kota ini. Berangkat dari latar belakang di atas itulah kota koloni Hindia Belanda Kutaraja yang dibangun di atas puing ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam pascakolonial dan kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Kota Banda Aceh yang di dalamnya mengakui perlindungan negara terhadap keberagaman dan penganut agama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Kota Banda Aceh Masa Kolonial

Pemerintah Hindia Belanda, mereka berupaya melakukan pembangunan di atas puing-puing pusat Kesultanan Aceh Darussalam dan berupaya menghilangkan memori kolektif orang Aceh. Mereka juga membangun sistem transportasi yang awalnya mengandalkan *sea system* yang mengoneksikan laut dengan pasar yang berada di pinggir sungai dan terhubung dengan jalan-jalan antar kampung dan dusun di sekitar kota. Pembangunan kota itu dilakukan untuk mendukung mobilitas militer Hindia Belanda. Mobilisasi pasukan dan peralatan perang dari tengah kota, yang kala itu mengalami banjir di musim hujan, dan kekeringan di saat musim

kemarau yang membuat mereka terus membangun jaringan rel kereta api dan jalan dalam kota.

Pembangunan rel kereta api yang berhasil dilakukan pertama kali di Kota Banda Aceh, yaitu jalur rel dan jalan dari Ulee Lhee - Kutaraja sepanjang 5 Km. Jalur ini berhasil diselesaikan menjadi jalur rel kereta api yang pertama milik pemerintah Hindia Belanda yang diresmikan pada 12 Agustus 1876.¹²

Tidak berselang lama setelah itu, jaringan dan koneksitas jalur rel kereta api telah berhasil dibangun Hindia Belanda yang menghubungkan seluruh ‘lini konsentrasi’ sehingga semua pos-pos militer Hindia Belanda di kota ini telah terkoneksi dengan pusat gubernemen, *kerkhof* (makam militer), rumah perwira, barak tentara, rumah sakit militer, kantor telegram, dan jalan-jalan utama di Kota Banda Aceh yang mulai dibangun sejak 1884-1893.

Tinggalan pembangunan Hindia Belanda ini memberikan gambaran unik dalam penataan Kota Banda Aceh pada saat itu. Beberapa tinggalan kolonial, ada yang masih dipertahankan, namun ada juga yang sudah berubah dan berpindah dari posisi semula. Bahkan ada di antara tinggalan itu nyaris tidak terpelihara dengan baik.

Bangunan kolonial bergaya ‘indies’ itu seperti kantor gubernemen atau pendopo Gubernur Aceh, *kerkhof* atau makam militer Hindia Belanda, toren air di Taman Sari, gedung telegraf yang kini menjadi kantor PSSI Provinsi Aceh, gereja Katholik Hati Kudus di Pante Pirak, gedung Bank Indonesia di jalan Cut Meutia, Gedung Baperis dan ICMI Provinsi Aceh di Kompleks Kandang Meuh, Rumah Sakit Militer Kodam Iskandar Muda, perumahan militer di Jasdram Iskandar Muda di Neusu, serta

Gedung SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh di Blangpadang, dan lain-lainnya.

Bangunan tinggalan kolonial itu sebagian telah beralih status kepemilikan tanah maupun fungsinya. Peralihan itu mulai terjadi sejak masuknya Jepang hingga pascakolonial khususnya setelah kemerdekaan, Bahkan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda di Den Haag pada 27 Desember 1949, mulai dilakukan nasionalisasi sehingga banyak sekali perubahan status dan hak kepemilikan dan penggunaan tanah serta peralihan fungsi dari tinggalan-tinggalan kolonial di Kota Banda Aceh.

Di antara tinggalan kolonial itu, ada yang beralih pemilik lahan dan pemilik bangunan. Salah satunya bangunan *Indische Kerk* atau yang dikenal dengan “Gereja Ambon”. Bangunan *Indische Kerk* ini awalnya berada di persimpangan jalan, antara jalan Teuku Chik Di Tiro dengan jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah. Namun setelah berubah status kepemilikan tanah, lokasi itu telah menjadi aset Komando Distrik Militer (Kodim) 0101 Kota Banda Aceh. Sedangkan bangunan *Indische Kerk* dipindahkan ke jalan Pocut Baren, di Kampung Mulia. *Indische Kerk* inilah sebagai cikal-bakal Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Kota Banda Aceh.¹³

Lahirnya Keberagaman Penduduk Masa Kolonial

Kendati Kota Banda Aceh berpredikat sebagai ibu kota Provinsi Aceh, dan mayoritas penduduknya penganut Islam, namun hal itu tidak berarti membuat pemerintah Kota Banda Aceh mengenyampingkan pembangunan toleransi antar etnis dan agama di kota ini sampai saat ini. Kisah keberagaman etnis

¹²G.P.J. Caspersz dalam Rusdi Sufi (ed), *Sejarah Perkeretapihan di Aceh*, (Banda Aceh: BPSNT, 2001) hlm.19.

¹³Noer Abijono, *Stereotif Etnik Antar Kelompok Etnik dalam Jemaat GPIB Banda Aceh*, (Darussalam: Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial, 1977) hlm.6

di kota ini sebenarnya juga sudah sangat lama terjadi, bahkan sejak masa puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam pada paruh awal abad ke-16 dan bertahan hampir selama dua abad (1514-1699). Keragaman etnis yang terlihat dari keanekaragaman nama kampung, seperti; Kampung Emperom (Turki), Kampung Kedah (Malaysia), dan Kampung Jawa. Pada saat itu tidak pernah tercatat dalam historiografi terjadi disharmoni di antara bangsa-bangsa, dan etnis-etnis yang hidup berdampingan di kota ini.

Pada saat bersamaan, Kesultanan Aceh Darussalam memberikan 'ruang kota khusus' untuk perkampungan pedagang asing di sisi timur sungai Krueng Aceh yang disebut Peunayong. Pada saat itu, Peunayong menjadi '*melting pot*' yang dilindungi oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Zona bebas ini dihuni oleh para pedagang yang non-muslim yang datang dari berbagai negeri di belahan dunia, tanpa memandang ras, agama dan kepercayaan. Mereka dipersilakan menjual dan membeli pelbagai komoditi di *haria peukan* atau pasar mingguan Peunayong, yang berada di pinggiran sungai Krueng Aceh.¹⁴

Kolonialisasi Hindia Belanda di Kota Banda Aceh yang dimulai sejak 1874, telah memunculkan gambaran adanya perubahan komposisi penduduk dalam kurun tersebut. Gambaran perubahan komposisi penduduk itu menampilkan sisi lain dari terciptanya keberagaman berbagai etnis dan agama di kota ini.

Pada masa itu gambaran penduduk kota ini lebih banyak didominasi oleh para pendatang yang non-Aceh. Dari gambaran data Sensus Penduduk (*Volkstelling* 1930) menghasilkan komposisi penduduk Kutaraja pada saat itu, sebagai berikut; 1) etnis Cina berjumlah 10.726 jiwa; 2) etnis Jawa

berjumlah 1.937 jiwa; 3) etnis Padang berjumlah 482 jiwa.¹⁵ Sedangkan penduduk Aceh yang tersisa di kota ini hanya berjumlah 746 jiwa.¹⁶

Gambaran data ini sinkron antara jumlah penduduk dengan keberadaan rumah ibadat agama mereka pada saat itu. Akibat komposisi penduduk dari adanya keberagaman penduduk menyebabkan munculnya rumah ibadat agama-agama penganutnya di kota ini. Pembangunan rumah ibadat agama penduduk Kota Banda Aceh pada saat itu dilakukan bersamaan dengan pembangunan kota oleh pemerintah kolonial sejak 1880-an, meskipun awalnya tidak berjalan lancar karena di tengah suasana perang, namun kemudian berjalan baik setelah perang mereda.

Di antara bangunan rumah ibadat yang paling cepat dibangun kembali oleh pemerintah kolonial di kota ini pada masa itu adalah Masjid Raya Baiturrahman dengan satu kubah. Peletakan batu pertama kalinya dilakukan pada 27 Desember 1881 dan selesai atau diresmikan setahun kemudian pada masa Gubernur Militer, Karel van Der Haijden tahun 1882.

Ketika suasana perang agak mereda, pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan pelbagai sarana dan prasarana publik lainnya, termasuk rumah ibadat dari penduduk yang beragama lain seperti gereja (Kristen Katolik dan Kristen Protestan), wihara umat Budha, bahkan pembangunan rumah pembakaran mayat penganut Hindu yang ada di kota ini. Bahkan pada masa Residen van Aken, Masjid Raya Baiturrahman diperluas lagi menjadi 3 buah kubah pada tahun 1936.

¹⁵Teuku Syamsuddin, *Pemetaan Suku Bangsa Melalui Aspek Budaya di Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Depdikbud Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1995/1996) hlm.7.

¹⁶Rusdi Sufi, *Perkampungan di Perkotaan sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial di Perkampungan Miskin Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Depdikbud, 1993), hlm. 6.

¹⁴<https://balarmedan.wordpress.com/2008/06/18/peunayong-kampung-lama-etnis-cina-di-kota-banda-aceh/> diakses 12 November 2016.

Keberagaman Penduduk Kota Banda Aceh Pascakolonial

Kota Banda Aceh pra-kolonial Hindia Belanda, sebenarnya berpenduduk mayoritas penganut Islam, persis seperti wajah kotanya pada saat ini. Fakta agama Islam sudah terlebih dulu ada dan membudaya, dapat dilihat dari sebaran tinggalan nisan lama yang berinskripsi sejarah lama yang menurut kajian yang dilakukan oleh para arkeolog yang rerata berinskripsi sekitar awal abad ke-16 dan 17.

Ketika setengah abad Kutaraja menjadi kota koloni, terlihat gambaran perubahan komposisi penduduknya. Gambaran itu terlihat dari sensus penduduk yang dilakukan Hindia Belanda (*Volkstelling*, 1930). Etnis Cina pada saat itu tercatat sebagai penduduk mayoritas, namun keberadaannya terus menyusut yang dimulai dari pendudukan Jepang, 12 Maret 1942, setelah meletusnya peristiwa DI/TII Aceh September 1953 dan setelah keluarnya fatwa ‘haram’ dan ‘kufur’ kelompok yang terlibat G30S/PKI pada paruh akhir 1965, di mana mereka ada yang terkait organisasi yang terlibat, seperti Baperki, Gerwani, dll.

Perubahan komposisi penduduk di Kota Banda Aceh terjadi pasang dan surut tergantung perkembangan ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi di level lokal, nasional, maupun global. Setelah Kota Banda Aceh jadi ibu kota Provinsi Aceh pada 1957, sejak saat itu dilakukan penataan kembali kehidupan di kota ini sehingga nama kota pun diubah dari “Kutaraja” menjadi “Kota Banda Aceh” sejak 1960-an.

Pada saat itu, arus urbanisasi di kota ini sedang sangat ramai, baik lokal maupun nasional. Migrasi dari daerah lain ke Kota Banda Aceh pada saat itu terjadi dan semakin ramai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah pemerintah Republik Indonesia membuka kembali Kota Sabang sebagai Pelabuhan Bebas. Dampaknya pada saat itu terjadi kemajuan yang sangat

signifikan, yang melahirkan pertumbuhan perekonomian di Kota Banda Aceh menggeliat kembali pasca terjadinya kelesuan akut pada perekonomian nasional sejak terjadinya konfrontasi antara Indonesia-Malaysia sejak 1963-1967.

Gambaran perkembangan Kota Banda Aceh terlihat dari data Sensus Penduduk 1971, yang menggambarkan semakin terbukanya lapangan kerja di Kota Banda Aceh yang menyerap tenaga kerja baru. Ketika itulah terjadi pertumbuhan perekonomian yang luar biasa membaik di kota ini, terutama di bidang perdagangan, rumah makan, dan perhotelan.¹⁷

Setelah masa itu, Aceh yang sedang larut dalam pembangunan politik Orde Baru sehingga muncul konflik baru sejak akhir 1976 hingga larut sampai 2004. Namun tiba-tiba terjadi perubahan besar ketika Kota Banda Aceh diguncang gempa dan *smong* 26 Desember 2004. Setelah kehancuran fisik kota itu, terjadi pembangunan dan penataan kembali Kota Banda Aceh ke kehidupan baru pasca kehancuran alami.

Sejak saat itu mulai dilakukan rekonstruksi dan rehabilitasi oleh pemerintah Indonesia dan donasi internasional pada masa tanggap darurat gempa dan tsunami Aceh-Nias. Puncaknya kota ini menjadi ikon kota di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam. Penerapan syariat Islam terjadi setelah penandatanganan *MoU* Perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Perdamaian ini akhirnya melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh No.11/2006 (UUPA) pada 2006 yang mengharuskan pemerintah mengakui beberapa kekhususan Aceh sebagai dampak perdamaian tersebut.

¹⁷Sensus Penduduk Seri E.No.01, *Penduduk Daerah Istimewa Aceh dalam Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Depdikbud 1992/1993), hlm.51-52

Sejak saat itu, penganut agama minoritas dan rumah ibadatnya di Kota Banda Aceh keberadaannya masih tetap diakui. Namun, kemudian terjadi perkembangan yang kurang menggembirakan ketika ibu kota ‘Serambi Mekah’ ini ‘distigmatisasi’ sebagai salah satu kota di Indonesia yang tidak toleran terhadap hal tersebut. Asumsi ini sah-sah saja terlepas dari sudut pandang mana orang menilainya, namun harus objektif melihat latar belakang dan sejarah Aceh.

Sewajarnya masyarakat tidak mengabaikan fakta sejarah dan kultur masyarakat Aceh yang sudah berakar lama, bahkan sejak sebelum menjadi koloni Hindia Belanda yang kemudian ‘mencerabut Kesultanan Aceh Darussalam’ yang berhasil menyemikan Islam dengan budaya masyarakatnya di dalam tatanan kehidupan yang harmoni. Fakta dan gambaran dari apa yang distigmatisasi tersebut berlawanan dengan kenyataan di lapangan.

Di Kota Banda Aceh, masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi beragama. Harmonisasi antar umat beragama di kota ini tampak dari adanya kenyamanan beribadah dan terpeliharanya rumah-rumah ibadah agama minoritas serta terlindungi fasilitas milik minoritas di kota ini. Bahkan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota ‘Serambi Mekah’ di mana kelompok minoritas boleh merayakan atraksi budaya di arena publik. Salah satunya kebebasan ekspresi antar etnis dan umat beragama seperti pesta dan pertunjukkan Barongsai di sepanjang jalanan kota pada setiap Perayaan Imlek, Cap Go Meh, serta pesta-pesta seremonial lainnya. Ternyata, penduduk Kota Banda Aceh tetap menghormati dan menikmati atraksi budaya dari kelompok minoritas itu tanpa mengusiknya.

Keberadaan Agama Kristen Masa Kolonial

Dalam historiografi disebutkan upaya penyebaran Kristen Katholik pernah dilakukan pada abad ke-16 ke Aceh. Namun upaya yang dilakukan *Ordo Karmel* atau *Ordo Fratrum Ordinis Betaissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo* dilakukan pada 29 November 1511 ternyata tidak berjalan mulus. Pada saat itu Karmel Dionisius dan Redemptus mengikuti pelayaran bersama pedagang Portugis yang berangkat dari Malaka ke Aceh. Di Aceh, mereka ternyata mendapatkan perlawanan sengit sehingga menyebabkan keduanya meninggal. Bahkan, untuk memperingati kegagalan misi penyebaran Kristen Katholik itu, kelompok ordo ini menasbihkan keduanya sebagai ‘martir’ yang diperingati setiap tanggal 29 November.¹⁸

Berbilang abad setelahnya datang para penganut Kristen Protestan ke Kota Banda Aceh. Masuknya para penganut Kristen Protestan ini bersamaan dengan berjalannya kolonialisasi Hindia Belanda. Mereka mendatangkan para penganut Kristen Protestan tersebut dari kalangan militer hasil rekrutan di Ambon Maluku, dan Manado Sulawesi Utara. Mereka didatangkan ke Kota Banda Aceh ketika mengemban tugas kedinasan di kemiliteran Hindia Belanda melawan pejuang Aceh.

Pada awal keberadaan Hindia Belanda di Aceh, mereka menugaskan rohaniwan Kristen Protestan yang bernama Pendeta Pattiselano sebagai pendeta militernya. Namun kemudian Pendeta Pattiselano digantikan oleh pendeta militer lainnya bernama Pendeta Izaak Dominic Thenu.¹⁹

Pada saat berkecamuk perang melawan Belanda di Aceh, pemerintah Hindia Belanda membuat suatu sistem

¹⁸Provinsial Karmel Indonesia, 1993, 70 *Tahun Karmel Indonesia, 1923-1993: Sejarah Ordo Karmel di Indonesia*, diakses 21 April 2020.

¹⁹*Perang Kolonial Belanda di Aceh*, edisi revisi, 1990, (Banda Aceh: PDIA), hlm.128.

pertahanan yang disebut 'lini konsentrasi'. Lini konsentrasi diciptakan oleh Mayor Jenderal A.W.P Weitzel untuk memagari kota ini dari serangan pejuang Aceh. Sistem ini yang menjadikan mereka sangat tidak nyaman dan leluasa dalam menata pembangunan Kota Banda Aceh, karena selalu mendapat serangan dari pejuang Aceh saat itu. Setelah penyerahan diri Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah pada awal 1903, mereka baru leluasa dalam membangun kota ini karena perang dan serangan pejuang Aceh mulai agak mereda.

Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun rumah ibadat bagi anggota militernya yang beragama Kristen Protestan di Kota Banda Aceh sejak 1911.²⁰ Perkenalan Aceh dengan Kristen Protestan sebenarnya tanpa diduga telah terjadi sejak 9 Agustus 1602. Saat itu sedang terbangun hubungan diplomasi yang baik, antara Kesultanan Aceh dengan Kerajaan Belanda. Ketika itu, di Belanda telah meninggal seorang utusan dari diplomat Kesultanan Aceh yang diutus oleh Sultan Alaidin Riayat Syah Al Mukammil bernama Abdul Hamid. Sebagai penghormatan pihak kerajaan memakamkannya di halaman gereja penganut Kristen Protestan St. Pieters di Middelburg, Zeeland.²¹

Pascakolonial dan kemerdekaan RI, masih banyak penganut agama Kristen Protestan yang bekerja di Kota Banda Aceh. Mereka umumnya berdinan sebagai ABRI (TNI/Polri), di antaranya ada yang berasal dari etnis Karo, Nias, Batak Toba, dan lain-lain. Sejak awal keberadaan Kristen Protestan di Kota Banda Aceh, para penganut agama ini bukanlah orang Aceh, tetapi para pekerja yang datang dari daerah luar Aceh yang bekerja di jawatan perkebunan, kereta api, dan pegawai

pemerintah Hindia Belanda.²² Hal inilah yang menyebabkan di Kota Banda Aceh menyisakan empat buah gereja, yaitu: sebuah gereja Katholik; dua buah gereja Protestan; dan sebuah gereja Methodis; yang masing-masing gereja terdapat sebuah lembaga pendidikan.²³

Berdasarkan sebaran etnis para penganut Kristen Protestan di Kota Banda Aceh pada masa kolonial yang didominasi oleh etnis Ambon dari Maluku dan etnis Manado dari Sulawesi Utara. Setelah kemerdekaan para penganut agama Kristen Protestan ini lebih didominasi oleh etnis Karo, Batak Toba, dan Nias. Mereka umumnya adalah anggota dan keluarga ABRI (TNI/Polri) maupun para pegawai dan pekerja yang berasal dari luar Aceh yang bekerja di Kota Banda Aceh.²⁴

Sejarah *Indische Kerk* di Kota Banda Aceh

Dalam catatan historis, setelah selesainya pembangunan kembali Masjid Raya Baiturrahman dilakukan Hindia Belanda pada 1886, maka pembangunan rumah ibadah agama lainnya juga mulai dilakukan di Kota Banda Aceh. Hal ini mulai terwujud sejak masa pemerintahan Gubernur Militer Hindia Belanda (1874-1918), terutama masa Gubernur Militer H.N.A. Swart (1904-1918) ketika itu Aceh disebut *Atjeh en Onderhoorigheden* (Wilayah Aceh dan Daerah Taklukannya).

Pembangunan ibu kota ini terus dipacu hingga masa pemerintahan Gubernur Sipil yang disebut *Gubernemen* (1918-1936). Setelah itu Wilayah Aceh dan Daerah Taklukannya menjadi Residen. Residen terakhir Hindia Belanda yang memerintah di Kutaraja adalah Residen Pauw yang memimpin kota ini sejak 1940-

²⁰Pembangunannya dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Militer dan Sipil, H.N.A Swart.

²¹PDIA, 1990, *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, (Banda Aceh: PDIA), hlm.18.

²²*Almanak Sumatera Tahun 1969*, hlm. 273; dan lihat *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, (Banda Aceh: PDIA, 1990), hlm.223.

²³*Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh*, Jumlah tempat ibadat menurut agama Kabupaten/Kota, 2011.

²⁴*Ibid*, hlm.280.

1942 hingga kedatangan Jepang, 12 Maret 1942.

Pendirian rumah-rumah ibadah agama lainnya di Kota Banda Aceh pada masa itu lebih bersifat sebagai tempat beribadat para penganutnya, yaitu militer dan pekerja di jawatan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama tidak pernah disebutkan dalam tujuan pembangunan rumah ibadatnya. Hal inilah yang tampaknya menjamin berjalannya toleransi beragama di kota ini.²⁵ Keniscayaan keberagaman terlihat dengan keberadaan rumah-rumah ibadah selain masjid di Kota Banda Aceh; di mana ada gereja, wihara, bahkan tempat perkumpulan kelompok *freemason* yang sekarang tinggalannya menjadi gedung SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh.

Pembangunan rumah ibadat Kristen Protestan pertama kali dilakukan pada 1911 di Kota Banda Aceh. Rumah ibadat itu pada masanya disebut *Indische Kerk*.²⁶ *Indische Kerk* ini pada awalnya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, atau di Simpang Kodim 0101 Kota Banda Aceh sekarang.

Pascakolonial, gereja *Indische Kerk* tersebut dipindahkan ke alamat baru, dan kemudian berganti nama menjadi Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Kota Banda Aceh. Gereja GPIB Kota Banda Aceh sekarang beralamat di jalan Pocut Baren, tepatnya di samping Gereja Methodis, Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

Pada awalnya rumah ibadat *Indische Kerk* ini dibangun khusus untuk para penganut agama Kristen Protestan yang bertugas di kemiliteran Hindia Belanda di Kota Banda Aceh. Rumah ibadat ini kemudian lebih dikenal dengan nama 'Gereja Ambon'. Munculnya nama 'Gereja Ambon' dikarenakan pada awalnya

gereja ini pengelolaan dan pengurusannya didominasi oleh orang-orang Ambon yang berdinasti di kemiliteran Hindia Belanda yang ada di Kota Banda Aceh, terutama *Korps Marechausse*.²⁷

Ketika *Indische Kerk* dibangun di Kutaraja, rumah ibadat ini bertujuan untuk menampung jemaat Kristen Protestan di kemiliteran Hindia Belanda. Mereka umumnya adalah para penganut Kristen Protestan yang berasal dari luar Aceh. Pembangunan rumah ibadah *Indische Kerk* di Kota Banda Aceh (Kutaraja) hanya sebagai tempat beribadat semata. Bukan untuk menyebarkan agama Kristen Protestan atau untuk menarik orang yang belum beragama ini hingga menjadi penganutnya. Oleh karena itu, para penganutnya di kota ini sering mengalami pasang dan surut yang sangat tergantung dari kedatangan dan kepulangan para penganut Kristen Protestan di kota ini.²⁸

Pendeta Pattiselano yang pertama sekali memimpin para jemaat militer Kristen Protestan di Kota Banda Aceh. Pendeta ini berasal dari etnis Ambon, Maluku. Namun kemudian ia digantikan oleh pendeta militer lainnya yang bernama Pendeta Izaak Dominic Thenu. Pendeta Izaak Dominic Thenu adalah penasihat militer *Korps Marechausse* atau pasukan elite yang sangat dihormati di Hindia Belanda dan sangat ditakuti oleh orang Aceh karena kekejamannya.

Pendeta Izaak Thenu yang menjadi tokoh pendiri *Indische Kerk* di Kutaraja pada tahun 1911. Ia sama seperti Pattiselano yang juga berasal dari etnis Ambon, Maluku. Namun, setelah Pendeta Thenu meninggal tahun 1937, ia digantikan oleh Pendeta Manuputty. Sedangkan pimpinan para jemaatnya bernama W.Aipasa yang juga berasal dari etnis Ambon, Maluku. Akibatnya gereja ini dikonotasikan oleh penganut Kristen

²⁵Noer Abijono, *Op.Cit.* hlm.6

²⁶*Ibid*, hlm.7.

²⁷*Ibid*.

²⁸*Ibid*, hlm.9

Protestan dari etnis lainnya sebagai ‘Gereja Ambon’.²⁹

Pendeta Izaak Thenu atas jasa-jasanya yang dianggap besar kepada Hindia Belanda dalam perang Aceh, pernah dibuatkan patungnya di Kutaraja setelah ia meninggal tahun 1937. Namun patung pendeta militer dari *Korps Marechaussee* yang dikenal sangat kejam itu oleh orang Aceh kemudian dipindahkan pada masa pendudukan Jepang dari Kutaraja.³⁰

Ketika kolonial Hindia Belanda berakhir dan mereka meninggalkan Kutaraja, Jepang menggunakan bangunan gereja *Indische Kerk* sebagai gudang makanan sejak 12 Maret 1942. Mereka juga menjadikannya sebagai tempat pemotongan daging untuk para prajuritnya di Kutaraja. Baru pada tahun 1948, gereja ini dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai tempat ibadat untuk penganut Kristen Protestan di Kota Banda Aceh. Pada tahun itu juga *Indische Kerk* diserahkan kepada GPIB, termasuk di dalamnya gedung *Indische Kerk* Kutaraja menjadi GPIB Kota Banda Aceh.³¹

Pada tahun 1948-1966, *Indische Kerk* atau ‘Gereja Ambon’ ini masih dipimpin orang-orang Ambon. Kala itu gereja ini dipimpin Pendeta J.B. Pattinasarani dan dengan pimpinan majelis jemaatnya M.B. Maipasa, dan J.Ch. Sapulete. Namun kala peristiwa G30S/PKI sempat berhembus isu, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) terlibat dalam gerakan makar terhadap negara tersebut. Di Aceh, organisasi yang terlibat G30S/PKI ini kemudian ditetapkan sebagai organisasi yang terlarang yang dianggap ‘kufur’ dan ‘haram’ sehingga wajib hukumnya ditumpas.³²

Ketika menghadapi isu *hoak* tentang keterlibatan dalam gerakan makar G30S/PKI tersebut, pimpinan Gereja GPIB Kota Banda Aceh segera mengklarifikasi kepada pihak keamanan yang berwenang pada saat itu (*tim screening*). Ternyata terjadi kekeliruan yang bersumber dari berhembusnya isu *hoak* tentang keterkaitan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dalam G30S/PKI. Setelah diusut lebih lanjut, sebenarnya yang terlibat dan terkait dengan G30S/PKI adalah Partindo (Partai Indonesia) sebuah partai lanjutan PNI (Partai Nasional Indonesia) dan bukannya Parkindo. Dengan diterimanya klarifikasi itu, maka selamatlah para penganut Kristen Protestan yang ada di Kota Banda Aceh dari bahaya besar revolusi rakyat yang sedang terjadi pada paruh akhir tahun 1965 itu.³³

Pada tahun 1963, Kota Banda Aceh menerima kedatangan para pasukan ARSU (kini ARHANUDRI) yang ditugaskan dari Manado, Sulawesi Utara ke Aceh dan disusul dengan penambahan prajurit baru ARSU pada 1968 yang merupakan penganut agama Kristen Protestan. Hal itu menambah anggota jemaat Kristen Protestan di kota ini hingga meningkat sebanyak 80 keluarga. Namun pada tahun 1975, pada saat sebagian pasukan ARSU dimutasi ke berbagai daerah di Aceh; seperti Sigli dan Bireuen, maka para penganut Kristen Protestan dan jemaat ‘Gereja Ambon’ di kota ini juga berkurang.³⁴

Pada tahun 1970-1974, GPIB Kota Banda Aceh masih dikuasai etnis Ambon, Maluku. Pada periode ini terpilih lagi J.B. Aipasa sebagai ketua majelis GPIB di kota ini. Padahal saat itu, jemaat gereja ini mayoritas etnis Karo dan Nias. Mereka lebih mendominasi dalam aktivitas dan kegiatan peribadatan mereka.³⁵

²⁹*Ibid.*

³⁰ PDIA, *Op.Cit.*, hlm.129

³¹*Ibid.*, hlm.6-7

³²*Ibid.*, hlm.7-8

³³*Ibid.*, hlm.7-9

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

Sejak 1974-1978 dominasi etnis Ambon sebagai penganut utama Kristen Protestan di GPIB Kota Banda Aceh mulai berakhir. Pada saat itu terpilih Akab Sebayang dari etnis Karo sebagai ketua majelis jemaat GPIB Kota Banda Aceh. Sejak saat itu, etnis Ambon, Maluku tidak begitu dominan lagi di struktur pengurus GPIB Kota Banda Aceh. Pada masa itu, struktur di Gereja Kristen Protestan ini telah didominasi etnis Karo.³⁶

Pada saat itu GPIB Kota Banda Aceh belum ada pendeta tetap, sehingga harus mendatangkannya dari Medan, Sumatera Utara. Baru pada tahun 1962, GPIB Kota Banda Aceh dikirimkan pendeta langsung dari ABRI (sekarang TNI). Pendeta militer yang pertama dikirim ke Kota Banda Aceh saat itu adalah Pendeta D.S. Lasse dari Nias. Kala itu pendeta GPIB Kota Banda Aceh tidak lagi didatangkan dari luar Aceh. Setelah Pendeta Lasse dimutasi keluar Aceh pada 1972, ia digantikan oleh pendeta dari militer Pendeta Pangaribuan dari etnis Batak Toba.

Baru sejak 12 Juli 1977, Majelis Sinode GPIB di Jakarta mengirimkan Pendeta Ds.Thaoofilus Natumnea menjadi pendeta jemaat GPIB Kota Banda Aceh. Sejak saat itu, GPIB Kota Banda Aceh sudah memiliki pendeta jemaatnya sendiri. Pendeta ini juga merangkap sebagai pendeta jemaat di GPIB Kota Sabang.³⁷

Penutup

Keberadaan tempat peribadatan kelompok minoritas Kristen Protestan di Kota Banda Aceh pada awalnya dirintis

oleh Pendeta Pattiselano. Namun, Pendeta Pattiselano digantikan oleh Pendeta Izaak Domine Thenu. Mereka berdua merupakan pendeta dari kalangan militer dan sama-sama berasal dari Ambon.

Pendeta Izaak Domine Thenu menjadi pendeta militer di Kutaraja sejak 1911 hingga meninggal 1937. Kisah inilah yang menjadi cikal-bakal pendirian Gereja Kristen Protestan Indonesia Barat (GPIB) Kota Banda Aceh. Ketika pertama kali dibangun nama rumah ibadatnya adalah *Indische Kerk*. Pada 1942, bangunan *Indische Kerk* diambil alih oleh Jepang dan dijadikan sebagai gudang makanan dan tempat pemotongan hewan untuk kebutuhan militer. Gereja Kristen Protestan akhirnya ini telah dipindahkan dari tempat asalnya di sudut jalan antara jalan Teungku Chik Di Tiro dengan Jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah ke jalan Pocut Baren, Kampung Mulia Kota Banda Aceh dengan nama Gereja Kristen Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Kota Banda Aceh pada 1948. GPIB Kota Banda Aceh menjadi salah satu bangunan rumah ibadat '*ikonik*' dari sejarah Kristen Protestan di Kota Banda Aceh sebagai bukti akan adanya keberagaman etnis dan agama di kota ini yang disebabkan latar belakang sejarah koloni Hindia Belanda pada masa lalu (1874-1942). Pascakolonial dan kemerdekaan, GPIB Kota Banda Aceh yang disebut 'Gereja Ambon' terus bertahan, namun jemaatnya tidak lagi didominasi oleh etnis Ambon, Maluku, dan telah digantikan oleh etnis Karo dan Batak Toba sejak tahun 1977.

³⁶*Ibid.* hlm.7-9

³⁷*Ibid.*

Hasbullah, S.S. adalah Peneliti Ahli Muda pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

PERKEMBANGAN MEDIA CETAK DI BANDA ACEH PADA ZAMAN KOLONIAL BELANDA DAN PENDUDUKAN JEPANG

Oleh: Sudirman

Pendahuluan

Media massa sebagaimana yang dikenal dewasa ini adalah nama kolektif bagi media cetak dan elektronik. Media massa mencakup seluruh alat komunikasi massa, seperti radio, internet, televisi, surat kabar, majalah, maupun hasil-hasil penerbitan yang memenuhi syarat untuk disebarluaskan, terbit secara periodik, bersifat umum, dan aktual.³⁸

Media cetak merupakan bagian dari media massa yang dibuat menggunakan bahan dasar kertas yang bertujuan menyampaikan pesan atau informasi. Unsur-unsur utama dari media cetak adalah teks dan gambar visualisasi. Pengertian media cetak pada umumnya dipahami secara khusus, yaitu koran, buku, majalah, dan sebagainya. Makna media cetak secara lebih luas adalah media untuk menyampaikan informasi bagi kepentingan umum atau orang banyak dalam bentuk tertulis.

Media massa merupakan kekuatan sosial yang mempunyai hubungan rangkap dalam membangkitkan pendapat umum atau opini publik. Media massa bukan saja memantulkan atau merefleksikan pendapat-pendapat umum yang ada dalam masyarakat, tetapi juga menimbulkan, menciptakan, menempa, serta memupuk

opini tertentu melalui pemberitaan-pemberitaan.³⁹

Media cetak tersebut pada mulanya berkembang di kota-kota, seperti Banda Aceh. Oleh karena itu, artikel ini membahas bagaimana perkembangan dan pengelolaan media cetak di Banda Aceh pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Zaman Hindia Belanda

Perkembangan persuratkabaran di Aceh pada masa pemerintahan Belanda berkaitan erat dengan terbentuknya kekuasaan Belanda di Aceh. Kekuasaan Belanda masuk ke Aceh pada akhir abad ke-19 M, sehingga perkembangan persuratkabaran di Aceh baru dimulai pada sekitar abad tersebut. Oleh karena itu, di Aceh lamban dalam perkembangan surat kabar dibandingkan dengan daerah lain, baik dari segi dimulai terbit surat-surat kabar maupun dari segi jumlahnya.⁴⁰ Surat-

³⁹Oesman Raliby, "Peranan Pers dalam Perjuangan Kemerdekaan dan Pembangunan Bangsa", majalah *Sinar Darussalam*, No. 32 Maret 1971, hlm. 14.

⁴⁰Jumlah surat kabar yang terbit di Aceh dengan daerah-daerah lain dapat dibandingkan, misalnya, dengan daerah Sumatera Barat. Pada waktu itu di Kutaraja terbit surat kabar *Pemberita Atjeh* dan merupakan satu-satunya surat kabar yang diterbitkan dalam kalangan orang-orang bumiputra, di Sumatera Barat pada periode tersebut sudah diterbitkan beberapa surat kabar, misalnya, *Sinar Soematra*, *Tjahaja Soematra*, *Warta Berita*, *Pertja Barat*, *Oetoesan Melajoe*, dan *Al-Moenir*. Di Medan selama periode 1885-1942, di antaranya terdapat *Deli Courant*, *Pewartar Deli*, *Soeara Tapanuli*, *Poesaka Karo*, *Soeara Batak*, *Soeara Bondjol*, *Mandailing*, *Tjin Po*, *Hoa Kiaw*, dan *Soeara Djawa*. Lebih lanjut

³⁸Suhartinah, "Kehidupan Persuratkabaran di Yogyakarta pada Masa Revolusi Fisik: Sebuah Studi Awal", dalam Zulfikar Ghazali (peny.), *Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi*, Jakarta: Depdikbud, 1995, hlm. 19.

surat kabar yang diterbitkan pada masa Pemerintah Hindia Belanda ada yang menggunakan bahasa Belanda, Melayu, dan Cina sebagai bahasa pengantar dan adapula yang mempergunakan bahasa daerah.

Media cetak berbahasa Melayu lebih penting bagi masyarakat Indonesia daripada pers berbahasa Belanda. Pers berbahasa Melayu dapat menarik pembaca-pembaca pribumi dalam jumlah yang banyak.⁴¹ Perkembangan pers bumiputra atau yang berbahasa Melayu sangat pesat, sehingga Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan sendiri surat kabar berbahasa Melayu dengan jumlah yang besar dan sumber-sumber penerbitan yang baik.

Selain itu, adapula surat kabar-surat kabar yang berisi berita atau karangan-karangan yang hanya ditujukan bagi keturunan Cina, seperti yang terjadi pada surat kabar yang terbit di Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Orang-orang Cina juga membiayai dan menerbitkan surat kabar berbahasa Melayu, tetapi lingkungan pembacanya adalah penduduk bumiputra.⁴²

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Aceh, surat kabar yang diterbitkan ada yang berbahasa Belanda dan adapula yang berbahasa Melayu. Surat kabar yang berbahasa Melayu pertama di Aceh adalah *Pemberita Atjeh* yang diterbitkan di Kutaraja (Banda Aceh).⁴³ Surat kabar itu berada di bawah pemimpin Dja Endar Moeda. Surat kabar *Pemberita Atjeh* dapat digolongkan sebagai surat kabar yang progresif di Aceh.⁴⁴

Setelah terbit surat kabar *Pemberita Atjeh*, diterbitkan sebuah surat kabar lain pada tahun 1907 M yang bernama *Sinar Atjeh*. Surat kabar *Sinar Atjeh* terbit dua kali seminggu, yaitu setiap

hari Senin dan Kamis. Surat kabar itu diterbitkan oleh perusahaan *Sinar Atjeh Companie* yang berkantor di jalan Peunayong No. 59 Kutaraja (Banda Aceh). Percetakan yang dipergunakan untuk mencetak surat kabar itu adalah *Atjeh Drukkerij en Boekhandel fillial* dari *Deli Courant* Kutaraja. Limboen Hwat bertindak sebagai pemimpin redaksi *Sinar Atjeh*, sedangkan bidang administrasi dan tata usaha dipimpin oleh Lim Boen San.

Surat kabar *Sinar Atjeh* terbit tiga halaman setiap penerbitannya dan kadang-kadang empat halaman. Berita-berita di *Sinar Atjeh* lebih banyak memuat iklan, baik dari pengusaha di Kutaraja sendiri maupun dari pengusaha di Batavia (Jakarta). Ulasan mengenai politik yang dimuat dalam surat kabar itu banyak ditulis oleh seorang penulis yang sering memakai nama samaran "Aron Tutjoh". Harga langganan *Sinar Atjeh* sebesar f.1.50 untuk tiga bulan dan sebesar f.3.00 untuk enam bulan. Daerah Kutaraja dan sekitarnya ditetapkan f.0.50 per bulan. Surat kabar itu banyak pula yang dikirim hingga ke Nederland.

Surat kabar lain yang diterbitkan oleh orang Aceh yang dapat bertahan lebih lama adalah *Soeara Atjeh* yang diterbitkan di Sigli. Surat kabar itu diterbitkan dua kali dalam setiap Minggu yang diasuh oleh T. M. Usman. Penerbitan pertama surat kabar *Soeara Atjeh* dilakukan pada tahun 1928 M dengan menggunakan bahasa Melayu. Ketika pemimpin umum surat kabar tersebut, T. M. Usman, selaku pemimpin redaksi pindah ke Kutaraja pada tahun 1932 M, perkembangan surat kabar itu pun mengalami perubahan. Kepindahan T. M. Usman ke Kutaraja berhubungan dengan pembentukan organisasi keagamaan yang diberi nama *Nadil Islahil Islamy* (Organisasi Perbaikan Islam) dan T. M. Usman menjadi ketua organisasi Islam tersebut.

lihat Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional*, jilid V, Jakarta: Depdikbud, 1973.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 297.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 303.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 298.

Sejak bulan Maret 1933, surat kabar *Soeara Atjeh* diterbitkan oleh organisasi *Nadil Islahil Islamy*. Dengan demikian, surat kabar itu bukan lagi kepunyaan perseorangan, tetapi menjadi surat kabar organisasi *Nadil Islahil Islamy*. Redaktur surat kabar tersebut, selain T. M. Usman ditambah lagi dengan Mohammad Hasbi.⁴⁵

Perkembangan persuratkabaran yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi politik atau sosial sebenarnya telah ada sejak timbulnya pergerakan nasional di Indonesia. Perkembangan pers setelah berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional menduduki tempat yang lebih penting dari pers Eropa. Beberapa organisasi pergerakan nasional mempergunakan pers sebagai alat komunikasi dengan para anggotanya dan juga untuk mengkritik kebijakan politik penjajahan Belanda.

Selain surat kabar *Soeara Atjeh* yang merupakan surat kabar milik organisasi, terdapat dua surat kabar milik Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua surat kabar milik PKI tersebut bernama *Oetoesan Rakjat* dan *Batterij* yang diterbitkan di Langsa.⁴⁶ Johan Ahmad, pengikut aliran kiri dari Sigli sering membahas berita yang berlawanan dengan Pemerintah Hindia Belanda, bahkan satu di antara tulisannya yang membahas tentang keadaan politik pada waktu itu, menyebabkan Johan Ahmad diasingkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Cilacap.⁴⁷

Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dibentuk pada tahun 1939, dalam perjuangannya juga mempergunakan majalah bulanan yang diberi nama *Penjoeloeh*. Majalah tersebut terbit satu kali setiap bulan. Pemimpin redaksinya

adalah Teungku Ismail Yakoeb. Majalah bulanan *Penjoeloeh* karena kesulitan percetakan di Aceh, sehingga dicetak di Medan. Majalah *Penjoeloeh* dapat bertahan hingga mendaratnya balatentara pendudukan Jepang di Aceh pada tahun 1942.⁴⁸

Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang di Aceh, pers mempunyai ciri tersendiri, setiap media massa selain yang dikelola oleh pemerintah Jepang dilarang terbit. Pemerintah Jepang di Aceh hanya menerbitkan surat kabar yang berada di bawah pengawasan Jepang, yaitu *Atjeh Sinbun*.⁴⁹

Pemerintah pendudukan Jepang di Aceh membentuk suatu badan yang diberi nama *Hodoka*, yaitu suatu badan propaganda resmi Jepang. Badan tersebut didirikan untuk melakukan propaganda demi kepentingan Jepang dalam usahanya menguasai seluruh wilayah Asia Timur Raya. *Sinbun Bu* merupakan bagian dari *Hodoka* yang bertugas menerbitkan surat kabar untuk kepentingan propaganda Jepang. Surat kabar yang diterbitkan *Sinbun Bu* Aceh bernama *Atjeh Sinbun* yang dicetak pada percetakan *Atjeh Drukkerij*, percetakan warisan Belanda di Aceh.

Atjeh Sinbun dipimpin oleh seorang direktur atau pemimpin umum, yaitu Abdul Wahid R, seorang penulis pada zaman kolonial Belanda di Medan. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, dia dibawa ke Kutaraja untuk memimpin surat kabar *Atjeh Sinbun*. Staf dewan redaksi *Atjeh Sinbun* diperkerjakan para penulis Aceh yang selama masa pemerintahan kolonial Belanda telah berpengalaman pada bidang jurnalistik.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Kartodirdjo, dkk., *Loc. Cit.*

⁴⁷ Abdullah Ali, dkk., *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1985, hlm. 107.

⁴⁸ Ismuha, "Mengenang Kembali Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh 30 Tahun yang Lalu, majalah *Sinar Darussalam*, No. 15. Juli 1969, Banda Aceh: Yayasan Pembinaan Darussalam/Studie Club Islam, 1969, hlm. 33.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 108.

Mereka itu antara lain, Ismail Yakub,⁵⁰ Ali Hasjmy, Amelz, Abdullah Arif, dan Talsya.

Anggota redaksi *Atjeh Sinbun* dari kalangan masyarakat Aceh itu ialah tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan di Aceh. Mereka para penulis yang terkenal pada masa-masa sebelumnya. Mereka masuk sebagai anggota redaksi surat kabar *Atjeh Sinbun* tidak lepas dari kegiatan perjuangannya.

Tokoh-tokoh perjuangan yang ikut menjadi redaktur *Atjeh Sinbun* terpaksa harus melakukan kerja sama dengan pihak tentara pendudukan Jepang. Hal itu dimaksudkan supaya memperoleh kesempatan mendidik rakyat melalui media massa. Tidak mungkin terjadi apabila mereka tidak melakukan kerja sama dengan Jepang yang pada waktu itu masih menguasai Aceh.

Sebaliknya, Jepang berusaha memanfaatkan tenaga-tenaga yang terkenal di daerah sebagai orang-orang yang duduk dalam staf redaksinya. Hal demikian didasarkan kepada pertimbangan bahwa setiap propaganda-propaganda dari pemerintah pendudukan Jepang dengan

mudah diterima oleh rakyat Aceh. Dari kerja sama kedua belah pihak itu, tampak bahwa terjadinya kerja sama itu disebabkan adanya saling ketergantungan antara kedua belah pihak.

Kerja sama antara tokoh-tokoh pejuang dengan Jepang tidak saja dalam bidang persuratkabaran, tetapi juga dalam bidang-bidang lain, seperti dalam pemerintahan dan pertahanan. Melalui surat kabar *Atjeh Sinbun*, para pemimpin perjuangan di daerah Aceh berusaha memasukkan ide-ide perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Dua kepentingan yang berbeda itu menyebabkan terjadinya pertentangan-pertentangan dalam tujuan penerbitan surat kabar antara pihak pemerintah pendudukan Jepang dengan para pemimpin rakyat Aceh pada surat kabar *Atjeh Sinbun*.

Pemerintah Jepang menyadari bahwa para redaktur surat kabar yang berasal dari kalangan masyarakat Aceh selalu berusaha mempergunakan surat kabar *Atjeh Sinbun* sebagai alat perjuangan mereka. Untuk mengawasi gerak-gerik para redaktur, di kantor redaksi *Atjeh Sinbun* ditempatkan seorang petugas Jepang yang mengawasi penerbitan *Atjeh Sinbun*. Pihak pemerintahan pendudukan Jepang begitu teliti dalam meneliti berita-berita ataupun ulasan-ulasan yang dibuat oleh para redaktornya. Sedikit saja ada unsur-unsur yang dianggap merong-rong kewibawaan pemerintah Jepang yang dimuat dalam surat kabar *Atjeh Sinbun* yang dimuat oleh para redaktornya, diberikan sanksi. Dalam banyak kasus, tindakan yang diberikan oleh pemerintah Jepang terhadap para redaktur yang bekerja di *Atjeh Sinbun* yang dianggap tidak mematuhi garis kebijaksanaan pemerintah Jepang, selalu dalam bentuk yang halus dan begitu berhati-hati. Biasanya para redaktur dipindahkan dari staf-staf redaksi *Atjeh Sinbun* ke tempat lain, tetapi tidak

⁵⁰ Lahir di Lhoksukon pada tahun 1915. Pada tahun 1931 melanjutkan pendidikan ke Sumatera Barat hingga tahun 1939. Ketika kembali ke Aceh, dia masuk organisasi Muhammadiyah dan menjadi ketua Perguisa. Dia termasuk tokoh penting dari kelompok pemikir PUSA dan diangkat oleh Jepang menjadi Inspektur Sekolah-Sekolah Agama di Aceh. Seorang penulis yang produktif untuk beberapa majalah yang terbit di Sumatera. Pengalamannya yang luas menyebabkan ia diangkat menjadi redaktur majalah PUSA, *PENJOELOEH* (1940-1942.) Selama masa revolusi, dia aktif sebagai pemimpin PNI dan juga dalam Markas Umum. Dia memainkan peranan yang aktif sebagai jaksa penuntut terhadap para *uleebalang* dalam rangka menyelesaikan Peristiwa Cumbok. Dia memperoleh Ijazah SMA pada tahun 1950-an. Dia pernah dipenjara di Sumatera Barat sehubungan dengan keterlibatannya dalam pemberontakan Darul Islam. Setelah menyelesaikan hukuman, dia pergi ke Mesir dan memperoleh gelar M.A dari Universitas Al Azhar, Cairo. Dia pernah bekerja di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN Walisongo di Semarang. Di antara karyanya adalah *Teungku Tjhik di Tiro: Hidup dan Perjuangan*.

kurang juga para redaktur harus meringkuk dalam tahanan *Kenpetai* Jepang.⁵¹

Tindakan terhadap para redaktur *Atjeh Sinbun* yang dianggap merong-rong kewibawaan pemerintah Jepang, pertama kali jatuh kepada Ismail Yakub pada awal tahun 1943 M. Alasan penindakan terhadap Ismail Yakub disebabkan tulisan-tulisannya yang dimuat dalam surat kabar *Atjeh Sinbun* dianggap oleh pemerintah Jepang sebagai suatu usaha yang sengaja dilakukannya terhadap pemerintah Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ismail Yakub sangat membahayakan bagi Jepang. Hukuman yang diberikan oleh pemerintah Jepang terhadap Ismail Yakub, yaitu dikeluarkan dari pemimpin redaksi *Atjeh Sinbun*. Selanjutnya yang bersangkutan pindah kerja sebagai guru agama pada *Chugakko* (SMP) di Kutaraja.

Ali Hasjmy ditunjuk sebagai pemimpin redaksi *Atjeh Sinbun* menggantikan Ismail Yakub. Dengan demikian, susunan redaksi *Atjeh Sinbun* berubah menjadi sebagai berikut: pemimpin redaksi Ali Hasjmy dengan stafnya antara lain: Amelz, A. G. Mutyara, Talsya, Ibnu Rasyid, dan Ridwan. Bagian Administrasi dan Tata Usaha dijabat oleh Syarif Alimi dan Aboe Bakar (abang Teungku Sulaiman Daud, mantan bupati pertama Aceh Utara). Untuk mengedarkan surat kabar tersebut ke seluruh daerah Aceh dan para langganannya, dijabat oleh Nyak Raden dan dibantu oleh Tahir.

Setelah Ismail Yakub, menyusul Amelz yang dikeluarkan dari redaksi *Atjeh Sinbun*. Pemberhentian Amelz dilakukan dengan cara yang lebih halus, pemerintah Jepang mengatakan bahwa Amelz akan disekolahkan ke Singapura. Ketika sampai

di Singapura Amelz tidak pernah mendapatkan pendidikan seperti yang dijanjikan oleh Jepang di Kutaraja.

Orang berikutnya yang ditindak oleh pemerintah Jepang dari kalangan redaktur *Atjeh Sinbun*, yaitu Ibnu Rasyid kemudian menyusul A. G. Mutyara. A. G. Mutyara disalahkan karena ulasannya yang dimuat dalam *Atjeh Sinbun* tentang pendaratan pasukan Sekutu di pantai Normandia. Akan tetapi, persoalan yang sebenarnya yang menyebabkan A. G. Mutyara ditindak oleh pemerintah Jepang, karena sebuah drama yang ditulisnya. Drama tersebut mengisahkan tentang perlakuan sewenang-wenang oleh majikan terhadap pembantunya. A. G. Mutyara dalam dramanya itu begitu mencela tindakan sewenang-wenang majikan yang menjajah pembantunya.⁵²

Pemerintah Jepang menyadari bahwa ceritera drama yang disusun oleh A. G. Mutyara merupakan perlambang tentang hubungan antara pemerintah Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, A. G. Mutyara ditahan oleh *Kenpetai* Jepang dan sempat dimasukkan ke dalam tahanan untuk beberapa lama. Setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh *Kenpetai*, A. G. Mutyara diperintahkan untuk mengajukan surat alasan kesehatan. Dengan demikian, A. G. Mutyara secara halus disingkirkan dari redaksi *Atjeh Sinbun*. Satu per satu anggota redaktur *Atjeh Sinbun* yang terdiri atas kalangan para pejuang di Aceh dengan berbagai alasan diberhentikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Akan tetapi, tidak pernah mau melepaskan sepenuhnya pemimpin harian tersebut. Mereka mempunyai suatu garis kebijakan bahwa biar orang-orang yang memimpin *Atjeh Sinbun* berganti-ganti asal saja ideologi perjuangan bangsa senantiasa sama.

Surat kabar *Atjeh Sinbun* yang merupakan satu-satunya surat kabar yang boleh terbit pada masa pendudukan Jepang

⁵¹ Para redaktur yang diberi tindakan oleh pemerintah Jepang ada yang seolah-olah dipindahkan kerjanya ke tempat lain atau dengan alasan diperintahkan untuk mengikuti pendidikan, misalnya, pada kasus Amelz dan adapula yang diperiksa oleh *Kempetai* Jepang dan harus meringkuk dalam tahanan, misalnya, A.G. Mutyara.

⁵² Ali, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 111.

di Aceh, terakhir kali terbit pada 15 Agustus 1945. Sebenarnya untuk penerbitan 15 Agustus 1945, segala sesuatunya sudah disiapkan, pekerjaan yang belum selesai hanya melakukan pencetakannya. Namun, tiba-tiba pejabat pemerintah Jepang datang dan memberitahukan kepada Ali Hasjmy,⁵³ *Atjeh Sinbun* untuk terbitan 15 Agustus 1945 dibatalkan saja, karena Jepang sudah kalah dalam peperangan melawan tentara Sekutu. Dengan demikian, *Atjeh Sinbun* untuk terbitan 15 Agustus 1945 dibatalkan penerbitannya. Dengan kejadian itu berakhirlah riwayat surat kabar *Atjeh Sinbun* di Aceh.

⁵³Lahir di Montasik, Aceh Besar, 28 Maret 1914. Setelah menyelesaikan pendidikan di beberapa dayah dan *Inlandsche School*, dia pergi ke Padang Panjang, Sumatera Barat untuk belajar di Thawalib. Di sana ia terpilih sebagai Ketua Pelajar Aceh yang didirikan oleh Ismail Yakub. Kembali ke Aceh pada tahun 1939, dia masuk PUSA dan aktif di Pemuda PUSA, kemudian menjadi seorang tokoh penting dalam organisasi kepanduan pemuda PUSA, *Kasyafatul Islam*. Dia mendirikan IPI/BPI yang pada bulan Oktober 1945 menjadi Pesindo. Menjabat sebagai Kepala Kantor Sosial di Kutaraja selama 1946-1949. Menjadi staf Gubernur Militer selama 1947-1949. Menjadi pejabat di Kementerian Sosial Jakarta, sebelum diangkat menjadi Gubernur Aceh pada tahun 1957. Dia juga dikenal luas sebagai sastrawan dan ulama Aceh.

Penutup

Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, media massa cetak dikuasai sepenuhnya oleh kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam surat kabar tersebut adalah bahasa Belanda dan isi beritanya mengenai orang-orang Eropa di Indonesia. Namun, pada umumnya, media-media cetak yang terbit pada saat itu isinya lebih banyak iklan dan berita ringan.

Pada masa pendudukan Jepang, mereka mengawasi secara lebih ketat isi berita pada media massa cetak, bahkan penerbitan media cetak juga sangat dibatasi. Berbagai media massa cetak yang terbit sejak masa kolonialisme Belanda diambil alih oleh Jepang. Surat kabar yang dianggap membahayakannya dihilangkan atau digabungkan dengan surat kabar lain dengan alasan penghematan anggaran. Berita-berita yang diterbitkan media massa cetak pada masa pemerintahan Jepang harus memuat nilai-nilai yang memuji-muji pemerintahan pendudukan Jepang.

Sudirman, S.S., M.Hum. adalah Peneliti Ahli Madya pada
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

KOTA BANDA ACEH: DARI KOTA TRADISIONAL MENUJU MADANI

Oleh: Nurmila Khaira

Pendahuluan

Berusia 815 tahun pada 22 April 2020 lalu, Kota Banda Aceh adalah salah satu kota tertua yang dimiliki Indonesia. Statusnya sebagai kota dan kemudian menjadi ibu kota provinsi mengantar kota ini dalam perjalanan sejarah yang panjang. Sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Aceh, Kota Banda Aceh telah mengalami jatuh bangun, hancur dan bangkit kembali dalam menghadapi perebutan kekuasaan para raja terdahulu hingga gempuran Belanda. Sejarah mencatat, Banda Aceh Darussalam yang dahulu menjadi ibukota Kerajaan Aceh Darussalam mengalami masa kegemilangannya pada saat Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah, Sultan Alaidin Abdul Kahhar, Sultan Alaidin Iskandar Muda Meukuta Alam dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin memerintah⁵⁴.

Dilihat dari periodisasinya, Kota Banda Aceh telah mengalami paling tidak tiga periode sejarah dengan segala perubahan wajah dan fungsinya. Makello dalam jurnalnya menyebutkan bahwa ada empat periodisasi dalam pengelompokannya berdasarkan kecenderungan tema kajian sejarah perkotaan di Indonesia, yaitu kota prasejarah, kota tradisional, kota kolonial dan kota modern⁵⁵. Dalam artikelnya⁵⁶,

Makello mendefinisikan kota prasejarah sebagai pemukiman-pemukiman awal yang menjadi cikal bakal terbentuknya tempat berkumpul dan beraktifitas bagi komunitas yang menduduki wilayah tersebut.

Kota tradisional secara umum diartikan sebagai kota pusat kerajaan-kerajaan awal di Nusantara atau ibukota kerajaan yang ada pada masa sebelum kekuasaan kolonial berlangsung dan umumnya merupakan pusat kerajaan-kerajaan di masa lalu serta seringkali ditandai dengan pembagian spasial yang jelas berdasarkan status sosial dan dekatnya kedudukan pemukiman masyarakat dengan istana.

Sementara itu, Makello juga menggambarkan kota kolonial dalam perspektif sejarah Indonesia yang merujuk pada pembangunan sarana dan prasarana perkotaan seperti fasilitas perumahan dan perkantoran, transportasi dan komunikasi, perdagangan, sarana pendidikan dan kesehatan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menunjang hegemoninya. Pada kota ini, pembangunan seperti bank, pertokoan, jembatan dan hotel mulai muncul sebagai buah dari timbulnya aktivitas ekonomi masyarakat⁵⁷.

Selanjutnya kota modern dideskripsikan sebagai kota yang menggambarkan perubahan pada masyarakat. Hal ini ditandai dengan pembagian pemukiman yang kebanyakan berdasarkan atas kelas social sehingga terlihat makin tergesernya penghuni kota

⁵⁴ Ali Hasjmy, *Sulthan Alaidin Johan Syah Pendiri Banda Aceh Darussalam* dalam *Kota Banda Aceh Hampir 1000 Tahun, 1988*, Banda Aceh: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Hlm. 49.

⁵⁵ Ilham Daeng Makello, *Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis*, Jurnal Lensa Budaya Vol. 12 No. 2, Oktober 2017, hlm. 85.

⁵⁶ *Ibid*, hlm.85-88

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 87-88

yang lama oleh penghuni baru yang menempati bagian-bagian kota strategis⁵⁸.

Perubahan wajah kota tidak terlepas dari perubahan kondisi masyarakat yang mendiaminya. Wajah kota sering kali menjadi cerminan kemajuan peradaban dan kebudayaan masyarakatnya. Kebudayaan masyarakatlah yang menjadi jiwa dan karakter sebuah kota, sementara aspek lingkungan (fisik) yang menjadi raganya. Keduanya digambarkan sebagai sekeping mata uang dengan dua sisinya, apabila masyarakat pendahulu dapat amebangun karakter yang kuat pada sebuah kota, maka masyarakat pendatang akan lebur dalam jati diri kota tersebut⁵⁹.

Artikel ini mencoba untuk menggambarkan perubahan Kota Banda Aceh dan membatasi bahasannya pada periode kota tradisional, kolonial hingga menjadi kota modern dengan secara singkat memaparkan wajah kota pada tiga periode tersebut dan gambaran umum masyarakatnya.

Kota Banda Aceh Masa Kesultanan

Kota Banda Aceh didirikan pada hari Jumat tanggal 1 Ramadhan 601 H atau pada 5 Mei 1205 oleh pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Alaidin Johan Syah⁶⁰. Saat itu, Kota Banda Aceh yang baru berdiri belum menjadi ibukota kerajaan bernama Banda Darussalam dan baru menjadi ibukota kerajaan pada masa pemerintahan cucu Sultan Alaidin Johan Syah, yaitu Sultan Alaidin Mahmud Syah I yang memerintah pada tahun 1267-1309. Sultan Mahmud Syah mendirikan sebuah kompleks istana Darud Dunia di Kota Banda Aceh sekaligus memindahkan tempat tinggal raja dari Kandang Aceh⁶¹.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 88

⁵⁹ Amar, *Identitas Kota, Fenomena dan Permasalahannya*, Jurnal "ruang" Vol. 1 No. 1, September 2009, hlm. 55

⁶⁰ Rusdi Sufi, dkk, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, 1996, Banda Aceh: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hlm. 1

⁶¹ *Ibid.*

Dilihat dari letak geografisnya yang berada di pesisir pulau, Kota Banda Aceh dahulu merupakan pusat perdagangan yang mengandalkan kelancaran jalur perdagangan terutama dari para pedagang Islam. Lambat laun, Kota Banda Aceh tumbuh menjadi pusat politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara⁶². Mengandalkan sumber komoditi dari kerajaan-kerajaan otonom yang telah ditaklukan- seperti Daya, Singkel, Barus, Siak, Lamuri, Pidie, Pariaman, Tiku, Pasei, Peureulak, Aru dan Deli Siak, -Kota Banda Aceh berkembang menjadi kota perniagaan yang ramai.

Setelah Kota Banda Aceh dipenuhi dengan aktivitas perdagangan, kampung-kampung yang dihuni oleh para pendatang asing mulai bermunculan, seperti Kampung Mperum dan Bitai yang didiami oleh orang Turki dan Arab, kampung orang-orang Birma dan Jawa, perkampungan orang Tiongkok seperti Peunayong, serta perkampungan orang asing lainnya seperti Kedah, Kampung Klieng dan lainnya. Sementara beberapa kampung didominasi oleh para penghuni yang memiliki pekerjaan yang sama seperti kampung Pande yang didiami oleh tukang-tukang atau Kampung Bideun yang dihuni oleh para penghibur.⁶³

Kediaman Sultan atau disebut *Dalam* merupakan cikal bakal dari munculnya gampong-gampong yang ramai dan makmur. Bersama dengan pasar, kediaman Sultan menjadi pusat kehidupan dan perkembangan kota. Beberapa gampong yang paling penting adalah Gampong Jawa, Pande, Peunayong, Lam Bhu', Lueng Bata, Lam Seupeueng, Ateueung, Batoh dan Meura'sa. Bahkan pada masanya dahulu, gampong-gampong ini disebut dengan julukan banda, yaitu

⁶² *Ibid.*, hlm 2.

⁶³ Zakaria Ahmad, et al, *Banda Aceh sebagai Pusat Pemerintahan Kesultanan Aceh*, *Ibid.*, hlm.225

kota berkembang dengan masyarakat yang beradab dan berwatak ibu kota.⁶⁴

Ramainya Kota Banda Aceh dengan aktifitas perdagangan juga menjadi pintu masuknya berbagai interaksi masyarakat salah satunya adalah dalam bidang agama. Masyarakat Aceh berinteraksi dengan para pedagang dan penziar agama Islam, khususnya dari Gujarat dan Timur Tengah.⁶⁵ Dengan ramainya interaksi masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan suku bangsa, tidak berlebihan jika Kota Banda Aceh saat itu dapat dikatakan sebagai kota kosmopolitan. Mereka yang pernah datang dan tinggal di Kota Banda Aceh di antaranya adalah orang-orang Gujarat, Arab, Tionghoa, Jawa, Keling dan Pegu (Birma).⁶⁶

Dilihat dari sudut pandang pembangunan kota yang merupakan pusat kerajaan, Kota Banda Aceh saat itu adalah kota tradisional. Namun dilihat dari karakteristik dan interaksi masyarakatnya, kota Banda Aceh telah berkembang menjadi kota kosmopolitan tempat berkumpulnya berbagai macam orang dari berbagai latar belakang agama dan suku bangsa dan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi Kerajaan Aceh kala itu.

Kota Banda Aceh Masa Kolonial

Pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Serangan pertama yang dilancarkan Belanda pada tanggal tersebut berbuah kekalahan meski sempat menduduki Mesjid Baiturrahman. Sejak saat itu, Kota Banda Aceh menjadi salah satu dari sekian banyak medan peperangan melawan Kolonial. Seluruh wilayah Kota Banda Aceh perlahan-lahan dikuasai Belanda dalam kurun waktu 1873-1874 ketika Belanda berhasil memasuki

dan menduduki istana pada Januari 1874⁶⁷. Pada tahun yang sama, Kota Banda Aceh kemudian menjadi Ibukota Gubernemen Belanda di Aceh dan diganti namanya menjadi Kutaraja⁶⁸.

Secara fisik, Kota Banda Aceh pada periode ini bertransformasi menjadi kota pusat pemerintahan kolonial yang ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan baru bergaya kolonial. Supremasi pendudukan pemerintahan kolonial Belanda salah satunya ditandai dengan dibangunnya pendopo gubernur yang dibangun pada tahun 1880⁶⁹, *De Javasche Bank* yang merupakan bank sentral Pemerintahan Hindia Belanda pada 2 Desember 1918⁷⁰, *Atjeh Tram* atau kereata api Aceh yang pembangunannya diusulkan pada tahun 1874 oleh Gubernur Militer Belanda⁷¹ dan Mesjid Baiturrahman yang dibangun kembali pada 1879 karena serdadu Belanda telah dua kali menyerang masjid ini (tahun 1873 dan 1874)⁷².

Kota Banda Aceh sebagai kota kolonial memang dipersiapkan dan dibangun untuk menunjang pendudukan kolonial Belanda dan perekonomian masyarakat. Kereta api contohnya, selain untuk mengakomodir pendistribusian barang kebutuhan, tujuan utamanya saat itu adalah untuk mengangkut serdadu dan

⁶⁷ Dien Madjid, 2013, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh Perdagangan, Diplomasi dan Sejarah Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 207.

⁶⁸ Rusdi Sufi, dkk, *op cit*, hlm.9

⁶⁹ Nurdin, *Pendopo Gubernur Aceh yang Dibangun pada Masa Kolonial*, kebudayaan.kemdikbud.go.id, 20 Oktober 2018. Diakses tanggal 20 Agustus 2020.

⁷⁰ Teuku Dedi, *Gedung BI Aceh Layak Jadi Situs Sejarah Banda Aceh*, Gatra.com, 10 Desember 2018. Diakses tanggal 20 Agustus 2020.

⁷¹ Redaksi, *Riwayat Atjeh Tram, Masa Kejayaan Kereta Api di Aceh*, Mediaaceh.co, 6 Agustus 2016. Diakses tanggal 20 Agustus 2020.

⁷² Kees van Dijk, 2007, *Perubahan Kontur Mesjid dalam Masa Lalu dalam Masa Kini Arsitektur di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 68.

⁶⁴ Snouck Hurgronje, 1906, *Orang Aceh Budaya, Masyarakat dan Politik Kolonial*, Leiden: E.J Brill, hlm. 87.

⁶⁵ Rusdi Sufi, dkk, *op cit*, hlm. 49

⁶⁶ *Ibid*

persenjataan⁷³. Sementara itu, komposisi masyarakatnya pun berubah. Para pedagang muslim yang dahulu banyak bermukim di pusat kota, mulai berpindah ke luar kota karena sikap permusuhan mereka kepada pemerintah kolonial Belanda yang dianggap kafir. Selanjutnya Kota Banda Aceh mulai ramai dihuni oleh orang-orang Belanda, para *ambteenar* dan para imigran yang pro Belanda⁷⁴.

Banda Aceh Pascatsunami: Menuju Kota Modern

Saat gelombang tsunami menyapu tanggal 26 Desember 2004, beberapa wilayah Kota Banda Aceh mengalami kerusakan parah seperti Meuraxa (daerah Ulee Lheu), Kuta Alam (daerah Peunayong-Syiah Kuala), Kutaraja (daerah Lampaseh), Jaya Baru (daerah Lamteumen) dan Kampung Kuedah yang berdekatan dengan Peunayong. Masjid Raya Baiturrahman yang berada di pusat kota juga terkena dampak terjangan air hingga menumpuknya sampah bawaan gelombang. Aktivitas kota lumpuh total hingga listrik dan sistem komunikasi dapat kembali beroperasi. Selanjutnya, Kota Banda Aceh secara signifikan mengalami perubahan baik secara fisik maupun karakter masyarakatnya.

Selama masa pemulihan, pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya mitigasi bencana, diantaranya penanaman hutan pantai mangrove. Di wilayah Kota Banda Aceh sendiri, hutan mangrove dapat ditemui di daerah pesisir di Ulee Lheu, Asoe Nanggroe, Deah Baro dan Tibang⁷⁵. Melalui bantuan dari berbagai negara dan organisasi dunia, Kota Banda Aceh juga memiliki sarana jalan yang lebih baik, diataranya daerah

Simpang Lima, Simpang Surabaya-Lampeunerut, daerah Ulee Lheu serta daerah Syiah Kuala.

Pembangunan Kota Banda Aceh tidak lepas dari peran BRR dan bantuan asing pasca tsunami. BRR yang dibentuk pada April 2005 sebagai badan berwenang untuk mengawasi rekonstruksi infrastruktur Aceh dan penyaluran dana amanah (*trust fund*) multi donor senilai sekitar 666 juta dolar AS yang dikelola Bank Dunia.⁷⁶ Selanjutnya musibah tsunami menjadi sebuah titik balik pembangunan Kota Banda Aceh yang sebelumnya dalam keadaan mati suri akibat konflik berkepanjangan.

Situs-situs peringatan muncul di beberapa lokasi di Banda Aceh. Masjid Baiturrahim yang terletak di Ulee Lheu menjadi salah satu situs peringatan karena letaknya yang persis berada di pinggir laut namun tidak hancur meski seluruh rumah dan bangunan yang ada di sekitarnya tersapu gelombang. Situs lain adalah Kapal Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terbawa gelombang sejauh 4 km dari tempat asalnya di Pelabuhan Ulee Lheu. Beberapa bangunan lain juga dibangun sebagai respon terhadap bencana gempa dan Tsunami diantaranya Museum Gempa dan Tsunami yang berada di seberang Lapangan Blang Padang dan Bangunan Penyelamat Darurat di Meuraxa.

Pembangunan Kota Banda Aceh menjadi kota modern ditandai dengan munculnya banyak pemukiman baru hingga ke kawasan pinggiran kota, munculnya fasilitas-fasilitas hiburan dan publik baru serta perubahan pola interaksi masyarakat. Pasca tsunami, Kota Banda Aceh secara massif mulai banyak dikunjungi oleh pendatang dan wisatawan akibat dari tersedianya jalur transportasi udara dan lancarnya transportasi darat. Kota Banda Aceh lambat laun menjadi

⁷³ Redaksi, *op cit*. Diakses tanggal 20 Agustus 2020.

⁷⁴ Rusdi Sufi, dkk. *Op cit*, hlm. 9

⁷⁵ Iskandar Eko Priatomo, 2006, *Kearifan Tradisional Masyarakat Simeulue Berkaitan dengan Smong*, Jurnal Suwa No. 8/2006, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, hlm. 27

⁷⁶ Vishnu Juwono, 2018, *Melawan Korupsi*, Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 254.

kota modern sebagai tempat tujuan wisata alam dan religi. Karakteristik modern ditandai juga dengan masyarakatnya yang mengaktualisasi diri secara berkelompok tapi terutama secara individu, melakukan tawar menawar, memberi dan mendapatkan sesuatu, bukan kuasa-menguasai.⁷⁷

Penutup

Keberadaan kota dalam perspektif sejarah dan budaya memiliki dinamika yang cukup tinggi dimana di dalamnya berlangsung aktivitas yang mempengaruhi bahkan menentukan arah perjalanan sejarah suatu masyarakat⁷⁸. Perjalanan Kota Banda Aceh sejak masa kesultanan hingga kota “madani” dan “gemilang”⁷⁹

⁷⁷ Jo Santoso, 2006, (*Menyiasati Kota Tanpa Warga*, Jakarta: Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 84

⁷⁸ Sarkawi B. Husain, 2019, dalam *Kota dan Jejak Aktivitas Peradaban*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 2

⁷⁹ Visi Kota Banda Aceh sebagai Kota Madani digagas oleh Iliza Sa’dudin Jamal yang

menjadi gambaran panjangnya rangkaian transformasi yang telah dilalui dan harapan para pemimpin kota dalam mewujudkan karakter khusus pada masyarakatnya. Seluruhnya bermuara pada cita-cita untuk menuliskan sejarah baru yang dapat dibanggakan generasi berikutnya.

Seiring dengan perjalanan sejarahnya yang panjang, Kota Banda Aceh terbukti telah bertransformasi dan bertahan. Usianya yang tua menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi, tidak hanya pada wajah fisik kota tetapi lebih dari itu, kemampuan masyarakat Kota Banda Aceh menyesuaikan diri dengan perubahanlah yang menjaga keberlangsungan berdirinya kota ini.

menjadi Walikota pada periode 2014-2007. Visi Kota Gemilang diangkat oleh Walikota Aminullah Usman pada tahun 2018.

Nurmila Khaira, S.S. adalah Pengelola Data Nilai Budaya pada
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

KOTA BANDA ACEH DAN PEDAGANG KAKI LIMA

Oleh: Agung Suryo Setyantoro

Pendahuluan

Kota yang dijumpai pada masa kini tidak terbentuk begitu saja. Semula kota merupakan wacana yang sederhana sebagai suatu kelompok manusia di suatu permukiman yang tinggal secara menetap yang menandai surutnya pola hidup secara berpindah-pindah. Tidak mudah menentukan bahwa suatu kawasan itu telah terbentuk sebuah kota. Ada beberapa ukuran yang menunjukkan gejala terbentuknya sebuah kota, seperti jumlah penduduk, heterogenitas kelompok masyarakat, ragam pekerjaan, kebutuhan, kepentingan dan pusat pemerintahan (politik) yang terdapat dalam kawasan itu.⁸⁰

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota-kota yang tumbuh dan besar layaknya kota-kota di daerah lain dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Pasca Tsunami 2004, Banda Aceh mendapatkan bantuan dari berbagai negara dan menjadikannya sebuah kota dengan fasilitas yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan warganya. Secara kasat mata pembangunan sudah terlihat di Ibukota Provinsi Aceh ini dalam beberapa tahun terakhir. Torehan prestasi Banda Aceh berdasarkan angka-angka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh 94,37 nomor tiga tertinggi di Indonesia setelah Yogyakarta dan Jakarta Selatan. Begitu juga dengan angka kemiskinan per 2018 tercatat 7,25 persen, dimana secara nasional masih berkisar 10 persen dan provinsi masih di atas 15 persen. Sementara pengangguran di Kota Banda

Aceh hanya tersisa 7,29 persen.⁸¹ IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, dan Standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.⁸²

Di tengah capaian prestasi Kota Banda Aceh saat ini terdapat fenomena yang dirasakan bertolak belakang ialah menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Pusat-pusat keramaian menjadi lokasi utama PKL biasa berada di pinggir-pinggir jalan protokol, seperti di Jalan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Stereotip negatif sering ditabalkan pada para PKL, seperti menambah kekumuhan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Artikel ringkas ini melihat fenomena sosial budaya yang terjadi di Kota Banda Aceh terkait keberadaan PKL yang semakin hari semakin bertambah marak. Pedagang kaki lima di kota-kota besar menjadi pemandangan yang jamak dilihat, sehingga ada kesan bahwa kota identik dengan keberadaan PKL.

⁸¹ "Aminullah: Alhamdulillah, Banda Aceh Bangkit Pasca Tsunami", dalam <https://waspada.co.id/2019/12/aminullah-alhamdulillah-banda-aceh-bangkit-pasca-tsunami/> (akses: 15 Mei 2020).

⁸² BPS Kota Banda Aceh. 2020. IPM Kota Banda Aceh 2019. (Banda Aceh: BPS KOTA Banda Aceh). Hlm. 15

⁸⁰ Paulus Hariyono. 2007. *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara). Hlm. 90.

Melihat Kota Dengan Segala Masalahnya

Sejarah mencatat bahwa kehidupan kota tertua berlangsung di Kawasan Bulan Sabit Yang Subur (*The Fertile Crescent*). Peradaban ini biasa juga dikenal dengan Timur Dekat (*Near East*). Kegiatan perdagangan merangsang berdatangnya orang-orang ke daerah itu. Urbanisasi pertama terjadi di sana dengan perdagangan dan teknologi sebagai daya tariknya. Perdagangan dan teknologi saat itu merupakan sebuah lompatan peradaban yang menandai dimulainya peradaban yang didasari oleh negosiasi dan kesepakatan. Perang bukan lagi satu-satunya cara untuk mendapatkan daerah dan barang baru.⁸³

Kini kita saksikan kota-kota di dunia lebih banyak mengandung ambivalensi. Kita yang hidup di kota bisa menemukan bagian-bagian kota sebagai tempat yang tertib, bersih, dan dilengkapi dengan peralatan canggih produk teknologi mutakhir. Namun, kita saksikan juga kriminalitas, perilaku menyimpang, penyalahgunaan narkoba, dan zat psikotropika, serta beragam kerusakan dalam kota. Jauh-jauh hari Brian Robson, ahli geografi urban memaparkan, kota bukan sekedar kumpulan atau kombinasi citra, tetapi memiliki arti sosial. Ada daya-daya social yang tak terindrai yang menggerakkan antrian orang di tempat perbelanjaan, pasar yang hiruk pikuk, kerumunan di hate bus, lalu lintas jalan raya, kehidupan kumuh, aktivitas di kantor-kantor, dan orang yang tergesa-gesa. Justru kualitas-kualitas yang tak terindrai dari kota yang menjadikannya berbeda dari tempat lain. Kualitas-kualitas itu mewujud dalam pertentangan kondisi kota: kemewahan dan kemiskinan, kebersihan dan polusi, tradisi dan inovasi, kekunoan dan kebaruan, keteratutran dan

penyimpangan, keriaan dan kemurungan, kebangkitan dan kejatuhan, keberlimpahan dan kekurangan, keguyahan dan konflik, kepekaan dan kepedulian, individualistas dan keolektivitas, pelayanan umum dan kesejahteraan yang mahal, serta kebebasan individual dan ketergantungan pada orang lain. Kota sebagai sebuah ambivalensi yang kompleks, sebuah medan pertentangan antara banyak sifat dan tentu saja antara banyak pihak. Beragam kepentingan para penghuninya adalah daya-daya yang sejak semula siap bersitegang, baik secara interpersonal maupun intrapersonal.⁸⁴

Louis Wirth, seorang sosiolog menulis sebuah esai berjudul *Urbanism as a Way of Life*. Dalam esai tersebut dikemukakan bahwa pemusatan penduduk di kota-kota dipandang sebagai *variable independent* yang menentukan kemungkinan-kemungkinan hidup bagi individu. Penelitian Wirth tersebut menunjukkan bahwa kota ditentukan oleh ukurannya yang cukup besar, kepadatan penduduknya dan heterogenitas masyarakatnya. Gaya hidup khas kekyoataan disebutnya *urbanisme*. Urbanisme melahirkan mentalitas kota dimana sikap, ide dan kepribadian manusia-manusianya lain dari yang terdapat di pedesaan. Gejala yang jelas di kota-kota ialah disorganisasi pribadi, aneka kejahatan, korupsi dan kekalutan dalam banyak hal.⁸⁵

Dilihat dari segi fisik, kota adalah suatu pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang berjarak relatif rapat dan yang mempunyai sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas yang relatif memadai guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduknya. Kota-kota di Indonesia dapat dilihat dan dikenali menurut statusnya dalam struktur

⁸³ Bagus Takwin. 2006. "Kota dan Kita", dalam Alfathri Adlin (Ed.). 2006. *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. (Yogyakarta: Jalasutra) Hlm. 129.

⁸⁴ *Ibid.*, Hlm. 134.

⁸⁵ Lihat dalam S. Menno & Mustawin Alwi. 1994. *Antropologi Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 7.

ketatanegaraan dan pemerintahan (administrasi). Kita dapat menjumpai kota-kota kecil yang pada umumnya adalah ibukota kabupaten dan kecamatan. Setingkat lebih tinggi ialah kotamadya, yang sejajar dengan daerah otonom tingkat II. Sebagian kotamadya ada yang berkedudukan sebagai ibukota propinsi. Dari segi perkembangannya, ada beberapa kota di Indonesia yang cenderung untuk menjadi sangat besar dan menjadi metropolitan.⁸⁶

Seperti dikemukakan oleh Robert Redfield, komunitas kota lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat material dan rasional sehingga hubungan-hubungan menjadi impersonal dan sekunder, bukan lagi "relation oriented", seperti yang terdapat dalam komunitas pedesaan yang mengandalkan hubungan-hubungan yang emosional dan primer, dimana orang saling mengenal secara pribadi dalam hampir semua aspek kehidupan. Di kota orang saling mengenal hanya dalam hubungan dengan aspek-aspek tertentu saja berdasarkan perhatian dan kepentingan. Hubungan kekerabatan dan kekeluargaan menjadi renggang, dan kalau masih ada hanya terbatas pada ikatan keluarga *batih*. Individu menjadi teratomisasi dan teranomisasi sehingga masing-masing harus mencari jalannya sendiri-sendiri untuk tetap hidup.⁸⁷

Di negara-negara yang sedang berkembang, pandangan bahwa kota merupakan pusat peradaban telah menjadi salah satu faktor yang kuat yang menarik orang-orang dari pedesaan untuk bermigrasi ke kota-kota, tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang disebabkan oleh menumpuknya orang-orang di kota, yang ruang tempat tinggal dan sumber hidup dan nafkah menjadi sempit dan langka, yang selanjutnya

membuat hidup lebih sulit dan kualitas maupun harkat manusia menurun.⁸⁸

Kota adalah tempat tak bertuan yang menjadi hak siapa saja; milik siapa saja sekaligus bukan milik siapa-siapa. Lebih jauh lagi, kota adalah wilayah terbuka tempat ketegangan dan harmoni terjadi bersamaan, tempat kebebasan sekaligus keterikatan menjadi penentu perilaku, tempat ketegasan dan tawar menawar sama-sama punya peran. Paradoks kepemilikan kota berasal dari watak utamanya: percampuran, keberagaman, dan keberadaban. Kota selalu merupakan kombinasi dinamis dan beragam fitur. Interaksi antarfitur membentuk dinamika kota, membentuk identitas kota yang tak pernah tetap.⁸⁹

Lapisan masyarakat menengah ke bawah dengan ketrampilan, pendidikan dan akses yang terbatas, peluang untuk memasuki sektor formal sangat terbatas. Akhirnya mereka mengeluti sektor informal yang tidak mensyaratkan kriteria yang berlebihan. Dengan modal yang terbatas, ditambah dengan ketrampilan dan keuletan, mereka mampu bertahan hidup di perkotaan. Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sektor informal berbagai macam, antara lain warung makan semi permanen di kaki lima; menjajakan makanan dengan menggunakan gerobak; warung kelontong dalam gerobak; menjual minuman dan makanan di tempat keramaian; berjualan mainan anak-anak; berjualan alat kebutuhan pelengkap; dan lain sebagainya.⁹⁰

Pelaku kegiatan sektor informal, diantaranya adalah Pedagang kaki Lima (PKL) dalam melakukan kegiatannya biasanya mencari tempat yang strategis untuk menggelar barang dagangannya.

⁸⁸ *Ibid.*, Hlm. 45.

⁸⁹ Bagus Takwin. 2006. "Kota dan Kita", dalam Alfathri Adlin (Ed.). 2006. *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. (Yogyakarta: Jalasutra) Hlm. 127.

⁹⁰ Paulus Hariyono. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 111.

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm. 21-26

⁸⁷ *Ibid.*, Hlm. 44.

Tempat strategis ini biasanya terletak di pusat-pusat keramaian.⁹¹

PKL adalah adalah para pekerja pada sektor informal yang banyak ditemui di perkotaan. PKL cenderung menempati lokasi yang tidak permanen dan tersebar hampir di setiap trotoar atau ruang-ruang “terbuka” yang bersifat umum. Dari penjelasan karakteristiknya di atas, penampilannya tampak dalam bentuk sarana dagangan yang sederhana yang umumnya, masih bercirikan tradisional dan sederhana.⁹²

Secara definitif, pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Penyebutan pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Perkembangan selanjutnya, istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.⁹³

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Ada juga yang mengatakan bahwa Asal mula kata pedagang kaki lima adalah berasal dari bahasa Inggris “feet” yang artinya kaki, dan ukuran 1 feet adalah sekitar 21 cm. Dulu, lebar trotoar adalah 5 feet (sekitar 1,5 m). Selanjutnya pedagang

yang berjualan di sepanjang trotoar disebut pedagang kaki lima.⁹⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian PKL menjadi semakin luas, tidak hanya pedagang yang menempati trotoar atau sepanjang bahu jalan saja. Ruang aktivitas usaha pedagang kaki lima yang semakin luas, dimana tidak hanya menggunakan hampir semua ruang publik yang ada, seperti jalur-jalur pejalan kaki, areal parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal, perempatan jalan, tetapi juga dalam melakukan aktivitasnya pedagang kaki lima bergerak keliling dari rumah ke rumah melalui jalan-jalan kecil di perkotaan.⁹⁵



Gambar 1. PKL di sudut Kota Banda Aceh

Cerita Pedagang Kaki Lima di Banda Aceh

Pada suatu sore, ada tetangga berkeluh kesah pada saya. Ibu Cut dan suaminya yang bekerja di sebuah toko fotokopi dan rental computer menuangkan kekesalannya mengenai semakin maraknya pedagang kaki lima yang memenuhi badan jalan protokol yang ada di Kota Banda Aceh. Saya dan istri yang berada di depan tokonya seperti mendapatkan aduan kekecewaan mereka atas maraknya lapak dagangan yang dibuat dari seng dan kayu menutupi toko yang disewanya. Dengan muka yang menampakkan kekecewaannya, Bu Cut bercerita, “toko kami tak nampak dari luar kak!”. Ketika saya amati memang benar, ada pedagang kaki lima yang menaruh sebuah rak dagangannya di depan toko fotokopinya. Dari arah jalanan yang

⁹¹ *Ibid.*, Hlm. 114.

⁹² Adon Nasrullah Jamaludin. 2017. *Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm. 272.

⁹³ *Ibid.*, Hlm. 272.

⁹⁴ *Ibid.*, Hlm. 272-273.

⁹⁵ *Ibid.*, Hlm. 273.

menjadi perbatasan dua gampong di Kecamatan Kuta Alam, ruko yang dibangun agak masuk ke dalam sesuai aturan pemerintah daerah itu menjadi tak terlihat oleh orang yang lewat di jalan. Apalagi ruko di sampingnya yang berjualan makanan khas Aceh memajukan rak-rak dagangannya agar terlihat dari jalanan. Semakin tertutuplah pandangan kearah usaha fotokopi Bu Cut. Beberapa tahun silam, saya juga pernah didatangi oleh pedagang kaki lima. Pedagang yang biasa mangkal tak jauh dari rumah saya itu minta izin untuk menaruh gerobak dagangannya di lahan sebelah rumah saya. Ia mengeluh, karena baru saja didatangi oleh satuan polisi pamong praja (Pol PP) yang bertugas untuk menertibkan lapak-lapak pedagang kaki lima. Pol PP itu memberikan tenggang waktu kepada para pedagang untuk membersihkan lapaknya sendiri, karena lapak-lapak di pinggir jalan itu dirasa mengganggu lalu lintas jalan dan keindahan kota.

Lapak atau ruang yang dijadikan tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima dari yang saya temukan ternyata menyimpan persoalan yang tidak mudah orang bayangkan. Ada ruang kosong, kemudian ditaruh rak dagangan dan adakalanya diberi tambahan seng untuk tempat berteduh dan langsung bisa berjualan. Namun ada juga pedagang yang menyewakan atau memperjual-belikan lapak dagangannya. Seperti lapak yang ada di depan toko fotokopi Bu Cut, sebuah lapak berukuran 2 x 2 meter dengan konstruksi kayu dan beratap seng dihargai sebesar Rp. 150.000,-. Transaksi sewa atau jual beli lapak yang terjadi di antara pedagang kaki lima itu tentu saja tidak ada ikatan resmi atau transaksi “bawah tangan”.

Kota juga menjadi daya tarik bagi penduduk luar kota untuk pergi ke kota dengan tujuan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Akhirnya peningkatan jumlah penduduk di perkotaan semakin tinggi dan padat. Kondisi ini menimbulkan

kurangnya ketersediaan lapangan kerja, terutama pada sektor formal mengakibatkan penduduk mencari alternatif pekerjaan lain dan sektor informal menjadi salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja di perkotaan. Salah satu usaha pada sektor informal adalah sebagai pedagang kaki lima (PKL).⁹⁶ Dari obrolan singkat saya dengan pedagang-pedagang yang berjualan di jalan Syiah Kuala Banda Aceh, banyak diantara mereka yang berasal dari luar Kota Banda Aceh. Dari pengakuannya, ada pedagang roti berasal dari Aceh Selatan, pedagang makanan khas Aceh dari Sigli dan lain sebagainya.

Gambaran diatas memperlihatkan kepada kita bahwa permasalahan pedagang kaki lima cukup kompleks di kota-kota tak terkecuali di Banda Aceh. Masalah yang timbul tidak hanya terjadi antara PKL dengan pemerintah kota yang sering menertibkan mereka, namun juga antara PKL dengan masyarakat di sekitar PKL itu berada.

Kapitalisasi ruang publik yang sering terjadi adalah merubah fasilitas-fasilitas umum untuk digunakan sebagai ruang berjualan. Seperti kasus hilangnya tong sampah yang biasa dimanfaatkan bersama oleh masyarakat, tiba-tiba berganti menjadi ruang tempat berjualan yang setiap sore hari tersusun rapi kursi-kursi plastik berwarna oranye.

Terlepas dari keberadaan PKL yang secara hukum dianggap mengganggu ketertiban umum dengan adanya Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, namun di sisi lain saya menemukan ada paradoks, yakni dengan ada retribusi kebersihan sebesar 15 ribu untuk pedagang yang menghasilkan sampah seperti pedagang kelapa muda dan air tebu peras yang dikutip oleh Dinas Kebersihan melalui petugas yang berkeliling setiap akhir bulan. Disatu sisi PKL dianggap illegal namun, di sisi

⁹⁶ *Ibid.*, Hlm. 265.

lainnya dengan memungut retribusi, keberadaan PKL seakan-akan menjadi legal.

Ada Karena Dicari: Menjamurnya Pedagang Kaki Lima

Berger dan Luckmann menyebutkan bahwa semua kegiatan manusia bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tiap tindakan yang sering diulangi pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang kemudian bisa direproduksi dengan upaya sekecil mungkin dan yang dipahami oleh pelakunya sebagai pola yang dimaksudkan itu. Pembiasaan selanjutnya berarti bahwa tindakan yang bersangkutan bisa dilakukan kembali di masa mendatang dengan cara yang sama dan dengan upaya yang sama ekonomisnya.⁹⁷ Sudah tentu tindakan-tindakan yang sudah dijadikan kebiasaan itu, tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu, meskipun makna-makna yang terlibat di dalamnya sudah tertanam sebagai hal-hal yang rutin dalam persediaan pengetahuannya yang umum, yang olehnya diterima begitu saja. Proses-proses pembiasaan ini mendahului setiap pelembaan. Pelembaan terjadi apabila ada suatu tipifikasi yang timbal-balik dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai tipe pelaku. Dengan kata lain, tiap tipifikasi seperti itu merupakan satu Lembaga. Tipifikasi tindakan-tindakan yang sudah dijadikan kebiasaan, yang membentuk Lembaga, selalu milik bersama.⁹⁸

Kota menyerupai suatu sistem, saling berkaitan dan berpengaruh. Misalnya masyarakat kota cenderung memiliki lebih banyak kebutuhan sehingga di kota akan lebih banyak (jenis) pekerjaan sehingga terdapat beragam profesi, pusat

perbelanjaan, dan fasilitas-fasilitas kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁹⁹

Kota-kota di Indonesia pada umumnya memiliki persolan dengan ruang publik, seperti persoalan parkir yang memakan tempat berlebihan ataupun memakan bahu jalan, masalah menjamurnya PKL, kemacetan lalu lintas, papan reklame yang berserakan dan penggunaan ruang publik yang kumuh.¹⁰⁰ Ada gejala bahwa apabila selama ini ruang publik cenderung dikonotasikan sebagai ruang aktivitas bagi masyarakat menengah ke bawah, tetapi pada akhir-akhir ini ruang publik dirasakan juga sebagai suatu yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke atas, paling tidak secara tidak langsung, yaitu ruang publik harus dapat memberikan kenyamanan bagi mereka sehingga ruang publik akhirnya menjadi rebutan bagi masyarakat golongan atas dan bawah.¹⁰¹

Trotoar dan bahu jalan, terutama di lokasi keramaian kota, dipenuhi oleh pelaku sektor informal PKL. Hal ini karena PKL dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu, mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Itulah sebabnya, dapat kita jumpai kehadiran PKL di sekitar lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Dalam teori lokasi juga disebutkan bahwa bagi pedagang terdapat kecenderungan untuk berorientasi pada konsentrasi konsumen dalam menentukan lokasi tempat usaha. Di samping faktor lokasi yang strategis dalam arti dekat dengan keramaian atau mudah

⁹⁷ Peter L. Berger & Thomas Luckmann. 2013. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES). Hlm. 72.

⁹⁸ *Ibid.*, Hlm. 72-74.

⁹⁹ Paulus Hariyono. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 16.

¹⁰⁰ *Ibid.*, Hlm. 139.

¹⁰¹ *Ibid.*, Hlm. 143.

dijangkau pembeli, PKL juga memperhitungkan faktor kedekatan.¹⁰²

Sering terlihat dalam setiap transaksi antara pedagang dan pembeli, dilakukan tanpa mempedulikan kondisi jalanan dan menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan. Pembeli dengan sengaja memarkirkan sepeda motor bahkan mobilnya tepat di depan lekak penjual yang ada di bahu jalan. Cukup dengan membuka jendela kaca mobil, transaksi jual-beli menjadi pemandangan yang jamak terlihat di jalanan.

Bagi pembeli, cara membeli tanpa harus turun dari kendaraan merupakan sebuah kemudahan yang tidak akan ditemui jika berbelanja di toko-toko. Hal inilah yang membuat pembeli merasa diuntungkan dari segi waktu yang lebih cepat. Penjual pun merasa bahwa ia harus menyediakan kebutuhan konsumen dengan cepat agar tak ditinggalkan pelanggannya. Tanpa disadari kebiasaan-kebiasaan tersebut menciptakan mutualisme yang terhabituasi.

Legalisasi PKL, Mungkinkah?

Sektor informal sering dianggap sebagai kelompok yang tidak diharapkan dalam pembangunan kota karena daianggap menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu pemandangan. Bahkan di Kawasan sector informal tertenti dianggap[memberikan peluang munculnya tindak kriminal. Kesan yang bersifat negatif tersebut sering menimbulkan praktik penggusuran sektor informal.¹⁰³

Sektor informal sering dipandang mengundang kemacetan lalu lintas dan kekumuhan. Untuk itu kehadiran sektor informal dapat ditata sehingga tampak lebih rapi, teratur, tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, dilakukan sistem keamanan terpadu dan tetap menjaga

kebersihan kota. Beberapa penataan dilakukan, misalnya pengkaplingan area untuk setiap pedagang kaki lima dengan ukuran tertentu yang tidak mengganggu pejalan kaki, mengelompokkan jenis barang dagangan, menyiapkan dan membongkar perlengkapan berjualan pada waktu yang telah ditentukan, menjaga kebersihan, dan ketertiban sehingga kesan kumuh tidak ada atau dapat dikurangi.¹⁰⁴

Satu sisi kehadiran PKL di sudut-sudut kota memberikan keuntungan bagi konsumen, pemerintah maupun untuk pedagang itu sendiri seperti menekan jumlah pengangguran, serta menyediakan berbagai keperluan masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Akan tetapi, pada sisi lain, PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan kotor, kumuh dan tidak tertib. Tidak heran jika masyarakat sering kali mengeluh akibat dari aktivitas PKL yang memanfaatkan fasilitas publik untuk berjualan.¹⁰⁵

Fenomena tersebut menggambarakan masih kurang matangnya perencanaan dan pengawasan pembangunan pada seluruh bagian kota sehingga menyebabkan PKL berkembang dengan tidak terencana dan liar. Inilah yang kemudian menimbulkan konflik antara pedagang PKL dengan aparat keamanan, sehingga sering PKL menjadi bulan-bulan aparat keamanan. Padahal, kehadiran PKL jika dikelola dengan baik, akan menjadi aset ekonomi bangsa Indonesia, yang memberi andil besar dalam hal ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan dan menjadi katup pengaman ekonomi kerakyatan.¹⁰⁶

Pedagang kaki lima di berbagai kota di negara berkembang merupakan fenomena keseharian yang bersifat

¹⁰² Adon Nasrullah Jamaludin. *Op.cit.*, Hlm. 280.

¹⁰³ Paulus Hariyono. *Op.cit.*, Hlm. 118-119.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 120.

¹⁰⁵ Adon Nasrullah Jamaludin. *Op.cit.*, Hlm. 266.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Hlm. 266.

kontroversial. Pada satu sisi, pemegang otoritas kota sering bersifat tidak ramah pada mereka, bahkan mengusir mereka dari tata ruang kota, tetapi pada sisi lain, mereka dijadikan sumber pendapatan bagi pemerintah kota melalui pungutan retribusi dan dapat mengatasi permasalahan ketenaga-kerjaan di perkotaan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang bersifat ilegal dan tidak tertata sering dianggap sebagai sumber problema dalam tata ruang kota yang lebih berorientasi pada estetika. Sekalipun demikian, persoalan pedagang kaki lima tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena semakin hari jumlah mereka semakin bertambah banyak dan mengganggu ruang gerak publik, terutama pejalan kaki. (266)¹⁰⁷

Apabila PKL menjadi pilihan sebagai ciri khas sebuah kota maka diperlukan penataan yang memadai, yaitu dengan menata ruang publik kita, PKL dan lalu lintas.¹⁰⁸ Pelaku kegiatan sektor informal ilegal seringkali merasa was-was apabila sewaktu-waktu kegiatannya digusur. Persoalan ilegal dan legal berkaitan dengan lokasi yang diizinkan oleh pemerintah kota setempat. Legalisasi

lokasi yang semula ilegal menjadi legal merupakan salah satu bentuk formalisasi sektor informal. Ada juga formalisasi PKL dengan cara memberikan kesempatan PKL untuk menempati sebuah petak atau *tenant* di pusat perbelanjaan.¹⁰⁹

Kesimpulan

PKL merupakan realitas yang tak dapat dihindari dalam setiap pertumbuhan kota-kota. Kecenderungan permasalahan yang sering dihadapi dengan adanya PKL yang terdapat di Kota Banda Aceh salah satunya adalah masalah keindahan dan ketertiban. Bagaimana menciptakan kota yang ramah PKL salah satunya dengan penataan PKL dan habituaisasi masyarakat agar mau berperilaku memanusiaikan kota. Penataan PKL di kantong-kantong “lahan tidur” dan juga ruang-ruang publik bisa menjadi alternatif mengurangi keberadaan PKL yang tersebar tak beraturan. Pemerintah dengan wewenangnya harus mampu memberikan teladan dalam penegakan aturan yang ujungnya bermuara pada kota yang lebih manusiawi.

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hlm. 266.

¹⁰⁸ Paulus Hariyono. *Op.cit.*, Hlm. 149.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Hlm. 113.

Agung Suryo Setyantoro, S.S., M.A. adalah Peneliti Ahli Pertama
pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh

CELANA CINGKRANG: ANTARA RADIKALISME DAN TREND FASHION KAUM PRIA DI PERKOTAAN

Oleh: Habib Firmansyah, Dharma Kelana Putra,
Haryanti Harahap

Pendahuluan

Mengamati perkembangan ragam gaya berpakaian (*fashion*) masyarakat di perkotaan memang memiliki ketertarikan tersendiri, sebab *fashion* atau gaya berpakaian bersifat dinamis dan penuh dengan kreatifitas. Karenanya, cara berpakaian masyarakat tidak pernah sama dan selalu berubah setiap saat. Dalam sejarahnya, *fashion* mulai berkembang sejak manusia mengenal teknologi pembuatan pakaian. Mulai dari bahan nabati yang paling sederhana seperti kulit kayu hingga bahan fabrikasi sintetik yang diproduksi dengan teknologi modern, semuanya menjadi bagian dari kreasi dan inovasi perkembangan *fashion* saat ini¹¹⁰. Tentunya, ini menjadikan pakaian dan cara berpakaian sebagai bagian dari peradaban manusia yang terus berkembang.

Fashion secara etimologi berasal dari bahasa latin *factio* yang artinya membuat, dimana seiring dengan berjalannya waktu definisi ini kemudian berkembang menjadi cara atau gaya seseorang dalam berpakaian¹¹¹. Di Indonesia, *fashion* lebih populer diucapkan sebagai *mode*. Sama seperti di mancanegara, *fashion* di Indonesia juga mengalami perkembangan yang dinamis¹¹². Hal ini dilihat dari gaya berpakaian

seseorang yang berbeda-beda dan seringkali melihat *trend* sebagai referensi.

Bagi sebagian kalangan, *fashion* menjadi suatu hal yang sangat penting. Mereka menganggap *fashion* tidak hanya sekedar alat untuk menutup tubuh, tetapi lebih dari itu ia juga dimaknai sebagai sebuah seni atau bahkan memiliki nilai yang sakral dalam suatu sistem kepercayaan¹¹³. Tidak hanya itu, *fashion* juga menjadi simbol yang digunakan untuk mendefinisikan diri atau mengidentifikasi pemakainya pada kelompok dan status sosial tertentu. Dalam Islam sendiri, pembahasan tentang konsep tata cara berpakaian yang baik sudah banyak dijelaskan oleh para ulama¹¹⁴. Konsep ini menjadi acuan bagi setiap umat Muslim baik bagi perempuan maupun laki-laki, sebagaimana yang di-syariatkan dalam agama Islam.

Lebih lanjut, untuk kaum perempuan (muslimah) pakaian yang dikenakan umumnya harus menutup aurat dan tidak memperlihatkan bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Tetapi ada juga yang menganjurkan untuk mengenakan cadar (*burqa*) agar terhindar dari pengaruh *syahwat* atau sebab-sebab lain yang dianggap menimbulkan kerugian bagi diri mereka. Sementara untuk kaum laki-laki (muslim), pakaian menutup aurat mulai dari puser hingga lutut. Sebagian

¹¹⁰Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.tentree.com/collections/hemp-clothing>

¹¹¹ Lihat Barnard, Malcolm. 2011. *Fashion sebagai Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 11.

¹¹²Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/2019-0712155341-35-84555/gairah-industri-fashion-indonesia>

¹¹³Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.theartnewspaper.com/feature/holy-inspiration-the-metropolitan-museum-of-art-is-examining-how-the-catholic-church-s-aesthetics-have-influenced-fashion>

¹¹⁴Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://muslim.or.id/47057-adab-adab-berpakaian-bagi-muslim-dan-muslimah.html>

kalangan bahkan berpendapat bahwa seorang Muslim dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang tidak *isbat*¹¹⁵ atau pakaian yang panjangnya tidak sampai menutupi mata kaki (cingkrang).

Di kawasan perkotaan seperti Kota Medan misalnya, trend mengenakan fashion yang *syar'i* seperti gamis dan celana cingkrang bagi kaum laki-laki serta *hijab* dan *niqab* bagi kaum perempuan mulai mengalami peningkatan. *Trend fashion* ini meningkat seiring dengan munculnya kesadaran tentang nilai-nilai keislaman yang juga didukung oleh sosialisasi dan penyampaian tentang syariat Islam di ruang publik, seperti mesjid, *tabligh* akbar, dan pengajian-pengajian di rumah warga.

Problem yang muncul kemudian adalah ketika gaya berpakaian *cingkrang* yang dianggap sebagai *syar'i* oleh umat Islam, justru dianggap sebagai simbol radikalisme oleh sebagian lainnya. Anggapan ini muncul karena para pelaku teror yang terjadi di Indonesia kerap menggunakan pakaian *syar'i* ketika melancarkan aksinya, termasuk beberapa kasus bom serta kasus penusukan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM yang terjadi 2019 lalu¹¹⁶.

Kondisi ini lantas menciptakan semacam *phobia* terhadap orang-orang berpakaian *syar'i*, sehingga membentuk stereotip negatif yang menyatakan bahwa jenis pakaian ini identik dengan kelompok radikal seperti ISIS, teroris, dan sebagainya. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini akan mendeskripsikan tentang: 1) bagaimana celana cingkrang dilihat dari sudut pandang antropologi; 2) sejauhmana isu celana cingkrang ini berkembang, serta; 3) bagaimana respon negara melihat

perkembangan celana cingkrang sebagai salah satu *trend fashion* di Indonesia.

Fashion dalam Perspektif Antropologi

Antropologi melihat bahwa *fashion* merupakan bagian dari sistem peralatan hidup dan teknologi, yang oleh Koentjaraningrat dirumuskan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) unsur kebudayaan¹¹⁷. Pembahasan tentang pakaian tidak hanya bicara soal penutup tubuh, tetapi juga sebagai penanda dari sebuah kultur yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Hal ini sebagaimana yang pernah diungkap oleh Coco Channel, bahwa "*fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening*"¹¹⁸.

Dalam perkembangannya, pakaian juga dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan lain seperti sistem kepercayaan, sistem kesenian, sistem mata pencaharian dan sebagainya. Perkembangan ini menjadi salah satu sebab munculnya profesi *fashion designer* sebagai orang yang menciptakan beragam bentuk pakaian dan motif sesuai dengan perkembangan zaman.

Ditinjau dari aspek sosiohistoris, *fashion* memang memiliki *zeitgeist* atau jiwa zaman. Itu sebabnya, *trend fashion* cenderung dipengaruhi oleh berbagai hal yang terjadi di masanya. Selain itu, *fashion* juga bersifat bebas nilai, sehingga *fashion* terus berkembang seolah tanpa batas serta mengikuti *trend* terlepas dari baik dan buruk nilai-nilai yang mempengaruhinya¹¹⁹. Lebih lanjut, beragam bentuk dan motif pakaian yang diciptakan memberikan banyak pilihan

¹¹⁵Pakaian laki-laki yang panjangnya menjulur hingga menutupi mata kaki

¹¹⁶Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.cmindonesia.com/nasional/2019/1011004228-20-438578/anak-terduga-pelaku-penusukan-wiranto-dipulangkan-ke-medan>

¹¹⁷Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru

¹¹⁸Lihat quotes tentang *fashion* pada tautan berikut: <https://www.marieclaire.co.uk/fashion/the-40-best-style-quotes-of-all-time-122453>

¹¹⁹Lihat selengkapnya dalam Vincken, Barbara. 2004. *Fashion Zeitgeist: Trends and Cycles in the Fashion System*. Oxford: Berg Publishers

bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai situasi. Preferensi ini biasanya dipengaruhi oleh motivasi, seperti; ingin tampil berbeda dari orang lain dan menjadi pusat perhatian di lingkungan sosialnya¹²⁰, tuntutan pekerjaan (seragam), atau bahkan karena tuntutan norma sosial dan agama¹²¹.

Selain sebagai preferensi dalam berpakaian, fashion juga dianggap sebagai simbol yang menandakan dari kelompok mana seseorang berasal. Oleh karenanya, hal ini seringkali memunculkan prasangka atau justifikasi berdasarkan stereotip dan label tertentu yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Stereotip bekerja dengan generalisir. Seseorang bisa saja dikenai stereotip tertentu hanya karena ia memiliki kesamaan identitas dengan orang lain yang pernah melakukan hal buruk, seperti; pembohong, teroris, miskin, pelit, radikal, terbelakang, intoleran, malas, anti-pemerintah, suka mencuri, lemah, kadal gurun, dan sebagainya¹²².

Secara sosiologis prasangka bekerja dalam penilaian yang subyektif, yang membedakan baik dan buruknya seseorang berdasarkan ciri-ciri tertentu termasuk warna kulit, etnis, agama, ras, serta pakaian yang dikenakan. Prasangka bekerja dengan mengidentifikasi seseorang ke dalam kelompok yang berbeda, yakni kelompok “kita” dan kelompok mereka”, lalu kemudian memunculkan perasaan superioritas bahwa kita lebih baik dari mereka. Prasangka yang paling ringan biasanya diekspresikan dalam bentuk

verbal atau simbol-simbol tertentu, seperti sebutan “kadal gurun” kepada kelompok Muslim oposisi pemerintah dan sebagainya. Tetapi prasangka yang ekstrim cenderung diekspresikan dengan cara menyiksa, membunuh, atau bahkan melenyapkan suatu kelompok dari keberadaan seperti yang terjadi di Myanmar, China, India, Bosnia, dan sebagainya.

Antara Trend dan Radikal: *Cingkrang* dan Problematikanya

High water pants sebenarnya sudah ada sejak tahun 1850-an, tetapi kemudian fashion ini tenggelam selama beberapa dekade¹²³. Fashion ini kemudian dipopulerkan kembali tahun 2004 oleh Thom Browne, salah seorang desainer kenamaan asal New York¹²⁴. Inspirasi dari *style* ini adalah anak laki-laki yang tumbuh tinggi namun mengenakan celana panjang dengan kaki yang lebih pendek. Tujuan dari *style* ini adalah untuk lebih mengekspos bagian kaki sehingga penggunaanya dapat menunjukkan *footwear* apa yang ia kenakan¹²⁵. Fashion ini kemudian berkembang menjadi bermacam ragam, beberapa diantaranya; *flooding pants*, *capri pants*, *cropped pants*, *roll pants*, dan sebagainya.

Salah satu hal yang menarik adalah bahwa *style* ini, entah disengaja atau tidak, ternyata memiliki kesamaan dengan konsep pakaian *syar'i* yang ada dalam agama Islam, yakni *sirwal* atau celana yang panjangnya berada di atas mata kaki. Penggunaan *sirwal* ini dipengaruhi oleh aspek historis ketika masa sebelum Islam

¹²⁰ *Bertrandias, L. dan Goldsmith, R. (2006), "Some psychological motivations for fashion opinion leadership and fashion opinion seeking", Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 10 No. 1, pp. 25-40.*

¹²¹ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/jamang-sang-sang-pakaian-alam-suku-baduy>

¹²² Lihat selengkapnya tentang stereotip dalam Soenarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

¹²³ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://today.line.me/id/pc/article/Tren+Celana+Cingkrang+di+Dunia+Fashion+Jadi+Gaya+Khas+Michael+Jackson-kMyDKw>

¹²⁴ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.thombrowne.com/id/sets/mens-trousers>

¹²⁵ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170518170823-277-215801/kala-celana-cingkrang-menginvasi-fesyen-pria-as-dan-korea>

belum berkembang di jazirah arab, yang ketika itu jubah (*flowing robe*) menjadi pakaian yang populer bagi kaum lelaki.

Pada masa itu, pakaian menjadi ukuran status sosial dan ekonomi seseorang. Semakin panjang jubah yang ia kenakan, semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakatnya. Karena panjangnya, terkadang seseorang membutuhkan orang lain untuk mengangkat kain tersebut ketika berjalan, dan mereka pun berjalan dengan penuh kesombongan¹²⁶. Agama Islam mengajarkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan di hatinya meskipun sebesar biji sawi¹²⁷, dan seseorang dituntut untuk melepaskan segala hal yang dapat menimbulkan kesombongan di hatinya termasuk dalam hal berpakaian. *Sirwal* sendiri kemudian mulai digunakan sebagai pakaian yang melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati.

Kesamaan gaya cingkrang antara *sirwal* dengan *high water pants* tak lantas membuat pakaian *syar'i* dapat diterima begitu saja. Dalam hal ini, *bias* penilaian tetap saja muncul dimana celana cingkrang di satu sisi dikatakan sebagai salah satu *style* dalam *fashion*, sementara di sisi lain justru diidentikkan dengan radikalisme dan hal-hal menakutkan lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Penggunaan celana cingkrang dalam dua lensa yang berbeda

(Sumber:

<https://cdn.idntimes.com/content-images/community/2018/12/photogrid-1544845116570-ad03cb3e4a8cb0a7e388a507cb8ec27d.jpg>)



Gambar 2. Penggunaan celana cingkrang dalam dua lensa yang berbeda

(Sumber:

<https://www.machomoda.com.br/2018/03/camisa-social-para-fora-da-calca-quando.html>)

Gambar di atas menunjukkan dua orang yang mengenakan pakaian dengan *style* cingkrang (*high water pants*). Gambar pertama adalah seorang selebriti asal Indonesia yang beragama Islam, sementara gambar kedua adalah selebriti asal Brazil dan bukan beragama Islam. Keduanya

¹²⁶Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.monitor.co.ug/Magazines/Life/-Tabliqs-wear-short-trousers-Allah-Moslem-teachings/689856-4534868-12dr74p/index.html>

¹²⁷ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://muslim.or.id/3536-jauhi-sikap-sombong.html>

mengenakan celana cingkrang, tetapi di Indonesia gambar kedua lebih dapat diterima dan dianggap sebagai bentuk kreasi dalam berpakaian. Labelisasi radikal terhadap pakaian *syar'i* sudah terlanjur melekat dalam benak masyarakat, sehingga muncul kecenderungan menilai seseorang yang mengenakan celana cingkrang, bergamis dan memelihara janggut sebagai orang yang berpaham radikal, pendukung *khilafah*, pengikut ISIS, atau bahkan teroris¹²⁸.

Tidak dapat dipungkiri, sebagian orang masih merasa takut dan khawatir melihat kawasan perkotaan dipenuhi oleh orang-orang yang berpakaian *syar'i*, baik yang bercadar maupun yang bercelana cingkrang. Apalagi jika mereka pernah berhadapan atau mengalami langsung teror yang terjadi, tentu itu akan sangat mengganggu kondisi kejiwaan mereka¹²⁹. Di lain pihak, orang yang menggunakan celana cingkrang juga sebenarnya merasa tidak nyaman apabila dianggap sebagai orang yang radikal, intoleran, serta berbagai stigma negatif lainnya¹³⁰. Alih-alih hidup rukun dalam perbedaan, yang muncul justru adalah ketegangan yang tak berkesudahan.

Kondisi ini kemudian membuat orang menjadi lebih kreatif dalam menjalankan syariat Islam dalam berpakaian, yakni dengan mencari formulasi tentang bagaimana agar pakaian tetap *syar'i* tetapi tidak membuat orang lain merasa ketakutan. Faktanya, celana cingkrang dan pakaian *syar'i* kini telah mengalami metamorfosa sehingga menjadi lebih *trendy* dan kekinian, dengan desain

yang lebih beragam dan warna yang tidak monoton. Kesemua itu muncul sebagai upaya untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa celana cingkrang dan pakaian *syar'i* tidaklah seradikal yang dicitrakan selama ini.

Dengan perubahan ini, stigma negatif terhadap celana cingkrang dan pakaian *syar'i* di perkotaan mulai menghilang. Beberapa situs belanja daring juga tidak segan lagi melakukan *highlight* terhadap beberapa produk, sementara beberapa *fashion designer* berlomba untuk berinovasi dalam celana cingkrang dan *fashion syar'i*¹³¹. Konsekuensinya, beberapa produk pakaian *syar'i* kini menjadi barang yang mahal, tetapi ini menjadi penanda bahwa celana cingkrang dan pakaian *syar'i* akan diterima oleh masyarakat di Indonesia sebagai bagian dari *fashion style*. Gejala ini sama seperti jaket *Hoodie* yang dulunya identik dengan kelompok radikal Ku Klux Klan, yang pernah menjadi simbol intoleransi terhadap perbedaan ras di Amerika namun kini menjadi salah satu *fashion* yang populer dan tidak pernah mati¹³².

Melarang Celana Cingkrang: Respon Pemerintah Tangkal Radikalisme

Menanggapi meningkatnya penggunaan celana cingkrang yang secara simbolis terlanjur dianggap sebagai pakaian kelompok radikal dan “pendukung *khilafah*”, Pemerintah berupaya untuk melarang ASN mengenakan celana cingkrang di lingkungan kerja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi dalam kutipan berikut:

¹²⁸ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.suaramerdeka.com/smceetak/baca/206959/soal-cadar-dan-cingkrang>

¹²⁹ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180513174450-255-297832/tak-ungkit-peristiwa-bantu-pemulihan-trauma-korban-bom>

¹³⁰ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://kumparan.com/kumparannews/pengalaman-pahit-wanita-bercadar-dituduh-teroris-dan-dilempar-botol-27431110790550531>

¹³¹ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://indonesiatripnews.com/gaya-hidup/fesyen/jawhara-syari-hadirkan-butik-busana-syari-elegan-dan-trendi/>

¹³² Lihat Ku Klux Klan pada Chalmers, David M. 1987. *Hooded Americanism: The History of Ku Klux Klan*. USA: Duke University Press.

“Kemudian masalah celana cingkrang itu tidak bisa dilarang dari aspek agama karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa, misal ditegur. ‘Celana kok tinggi begitu? Kamu enggak lihat aturan negara gimana?’ Kalau enggak bisa ikuti, keluar kamu”¹³³

Kutipan di atas merupakan bukti dari sikap tegas Menteri Agama terkait dengan eksistensi *khilafah* dan simbol-simbolnya, yang kemudian menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mereka yang tidak setuju beranggapan bahwa menggunakan celana cingkrang merupakan suatu upaya untuk mengikuti *sunnah* Nabi. Sementara mereka yang setuju beranggapan bahwa pelarangan celana cingkrang dan cadar dapat meminimalisir potensi radikalisme yang mengancam demokrasi dan Pancasila di lingkungan instansi pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan karena sebelumnya ada beberapa temuan yang mengindikasikan bahwa banyak ASN terpapar oleh paham radikalisme, baik di perusahaan BUMN maupun di instansi pemerintahan¹³⁴. Penelitian lain bahkan menyatakan bahwa ada 41 mesjid di lingkungan pemerintahan yang terpapar radikalisme¹³⁵. Tidak tanggung-tanggung, ASN yang ketahuan berpaham radikal diancam pemecatan karena dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewajiban

PNS untuk patuh kepada Pancasila dan NKRI¹³⁶.

Tentunya, fakta yang disampaikan oleh hasil-hasil penelitian tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri, sebab paham yang mengancam kedaulatan NKRI ini sebelumnya sudah lebih dahulu berkembang di berbagai mesjid dan kampus terkemuka di Indonesia¹³⁷. Kekhawatiran yang muncul adalah ketika paham radikalisme masuk ke lingkungan pemerintahan, bukan tidak mungkin bagi para penganut paham radikal untuk melakukan tindakan makar seperti merubah dasar negara dan merubah bentuk pemerintahan sebagaimana yang terjadi pada peristiwa 1965. Mungkin itu sebabnya, mengapa pemerintah juga mengeluarkan SKB 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara tahun 2019 lalu¹³⁸.

Di sisi lain, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyampaikan sulitnya mengidentifikasi ASN yang terpapar radikalisme, sebab ideologi berada di dalam kepala setiap orang¹³⁹. Ciri orang yang terpapar radikalisme tidak serta-merta dapat dilihat dari bentuk fisik, pakaian yang dikenakan, atau frekuensi menjalankan ibadah, sebab bisa jadi ia hanya orang muslim yang mencoba untuk bertaqwa. Salah tangkap dapat menciptakan preseden yang buruk bagi pemerintah, sebab pemerintah akan dianggap melakukan tindakan represif

¹³³ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191031122243-20-444456/usai-cadar-menag-permasalahkan-celana-cingkrang-pns>

¹³⁴ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.liputan6.com/news/read/3529744/ansor-bersihkan-virus-radikalisme-di-instansi-pemerintah>

¹³⁵ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://nasional.tempo.co/read/1104879/penelitian-sebut-41-masjid-pemerintahan-terpapar-paham-radikal>

¹³⁶ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://metro.tempo.co/read/1313126/pemprov-dki-ancam-pns-berpaham-radikal-dengan-pemecatan>

¹³⁷ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://belmawa.ristekdikti.go.id/nasir-potensi-radikalisme-di-kampus-sangat-tinggi/>

¹³⁸ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tangani-radikalisme-asn-pemerintah-bentuk-taskforce-dan-portal-aduan-asn>

¹³⁹ Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115084616-20-448539/pemerintah-sulit-identifikasi-asn-terpapar-radikalisme>

dengan prasangka ekstrim berdasarkan sentimen anti-Islam.

Kampanye pemerintah untuk mengakhiri eksistensi dari isu radikalisme yang mengatasnamakan agama di Indonesia tentunya akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Karena pada dasarnya isu radikalisme ini telah menciptakan ketidaknyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi umat Islam yang ingin menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* tanpa harus mengalami marginalisasi dan perlakuan diskriminatif karena rasa takut yang berlebihan.

Dengan tercapainya tujuan pemerintah untuk menghapus paham radikal di Indonesia, masyarakat akan kembali hidup rukun dalam perbedaan. Orang-orang yang berpakaian *syar'i* tidak akan mendapatkan stigma negatif sebagai pihak yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi sebagian besar umat Islam di Indonesia juga masih belum siap untuk menerima kebangkitan *khilafah* di nusantara, sebab kebangkitan *khilafah* merupakan salah satu tanda kiamat akan tiba¹⁴⁰. Sebagaimana yang telah diajarkan kepada orang Islam semenjak kecil, tidak ada satu orang muslim pun yang ingin menjadi saksi terjadinya hari kiamat¹⁴¹.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa ternyata *style* celana cingkrang tidak hanya dikenakan oleh

orang Muslim sebagai bagian dari syariat, tetapi orang di luar Islam pun menggunakannya sebagai bagian dari *fashion style*. Hal ini membawa pengaruh yang cukup besar dalam dunia *fashion* di Indonesia dan merubah stigma yang terlanjur berkembang bahwa celana cingkrang dan pakaian *syar'i* identik dengan radikalisme dan sarat akan pesan bernuansa intoleransi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan celana cingkrang dan pakaian *syar'i* oleh umat muslim di daerah perkotaan. Terlebih lagi, pakaian *syar'i* kini mulai dilirik oleh para perancang busana dan beberapa situ belanja daring sebagai lahan garapan baru yang sangat potensial.

Kemudian terkait dengan *fashion*, kita tidak dapat memaksa orang lain harus menyesuaikan pakaian yang ia kenakan dengan selera kita, apalagi jika hal itu berkaitan dengan kewajiban dalam kepercayaan yang ia anut. Tetapi sebagai insan yang hidup dalam negara demokrasi, kita dapat merubah cara pandang terhadap orang lain sehingga kita mampu menerima setiap perbedaan dengan lapang dada. Setiap orang pada dasarnya memiliki tubuhnya sendiri dan mereka berhak memperlakukan tubuh mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Setiap orang tidak butuh kontrol atas tubuh mereka, tetapi mereka butuh perlindungan atas apa yang mereka pilih untuk kebaikan diri mereka sendiri. Pilihan dalam berpakaian seyogyanya adalah bentuk aktualisasi diri, oleh karenanya pakaian yang dikenakan seharusnya tidak membuat seseorang dikenai stereotip dan label yang merendahkan.

¹⁴⁰Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <http://www.daaruttauhid.org/membekali-diri-menghadapi-fase-ke-5-akhir-zaman/>

¹⁴¹Lihat selengkapnya pada tautan berikut: <https://www.erasmuslim.com/hadits/manusia-terakhir-yang-berada-di-muka-bumi-adalah-manusia-terburuk.htm>

Habib Firmansyah adalah Mahasiswa pada Jurusan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Dharma Kelana Putra adalah Pengolah Data Nilai Budaya
pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
Haryanti Harahap adalah Pemerhati Sosial di Kota Medan

TINJAUAN HISTORIS SABANG SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN PERDAGANGAN BEBAS PADA AKHIR ABAD XIX HINGGA PERTENGAHAN ABAD XX

Oleh: Joshua Jolly SC.

Pendahuluan

Kota Sabang merupakan salah satu kota yang berada di ujung barat Indonesia, yakni di Pulau Weh. Kota ini sejak 2000 ditetapkan menjadi kota zona ekonomi bebas di Indonesia. Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sejumlah aturan dikeluarkan untuk mewujudkan Sabang sebagai kota zona ekonomi bebas tersebut. *Pertama*, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembangunan Pulau Sabang Menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tertanggal 24 Januari 2000. *Kedua*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tertanggal 1 September 2000. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang tertanggal 21 Desember 2000.¹⁴²

Keberadaan Sabang sebagai kota dengan perdagangan dan pelabuhan bebas ini tidak dapat dilepaskan dari konteks historis yang melingkupinya. Telah sejak lama Sabang berkembang sebagai kota pelabuhan (emporium) internasional yang ramai. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Sabang di Pulau Weh yang berhadapan dengan Samudra Hindia serta

Selat Malaka, yang mana merupakan jalur perdagangan maritim internasional terkemuka sejak dahulu. J.C. van Leur menyebutkan bahwa Samudra Hindia merupakan “wahana” perdagangan internasional yang merupakan cikal bakal “perdagangan modern”. Selain itu, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional yang diibaratkan sebagai ikatan emas yang membentang dari Tiongkok, melintasi Semenanjung Malaya, hingga ke Asia Barat.¹⁴³

Berabad-abad kemudian, bangsa-bangsa Barat berdatangan ke Nusantara, salah satunya Belanda. Telah sejak lama Belanda berusaha menanamkan hegemoninya, mula-mula melalui perdagangan monopoli hingga ekspansi politik-militer. Ketika Belanda mulai mengencarkan kebijakan ekspansi ekonomi yang dibarengi dengan ekspansi politik-militernya pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, Aceh merupakan salah satu wilayah yang menjadi incaran. Salah satu wilayah Aceh, yakni Sabang, juga turut menjadi incaran sebab telah lama disadari letak geografis Sabang yang strategis bagi perdagangan internasional. Oleh sebab itu, sejak paruh kedua abad ke-19 hingga memasuki abad ke-20, Sabang merupakan salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah kolonial Hindia Belanda serta berkembang pesat dalam wilayah tanah jajahan Hindia Belanda.

¹⁴² Bea Cukai Sabang, “Sekilas Kawasan Bebas Sabang”, dalam <https://www.bcsabang.beacukai.go.id/sekilas-kawasan-bebas-sabang/>, diakses pada 11 Juni 2020.

¹⁴³ J.C. van Leur, *Perdagangan dan Masyarakat Indonesia: Esai-esai tentang Sejarah Ekonomi dan Sosial Asia*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 69-70, 130.

Sabang dibangun dengan kekuatan utama pelabuhan. Secara umum, Bambang Triatmodjo berpandangan bahwa pelabuhan tidak diragukan menjadi salah satu sendi kehidupan masyarakat Nusantara yang kini menjadi Indonesia.¹⁴⁴ Dengan pelabuhan yang semakin berkembang, kehidupan masyarakat pun bertransformasi menjadi semakin kompleks. Dalam kacamata sejarah kota, hal ini merupakan paradigma evolusioner menuju sebuah masyarakat perkotaan yang mapan. Purnawan Basundoro menyatakan bahwa aspek transportasi, perdagangan, dan industri merupakan bagian tak terpisahkan dari paradigma evolusioner ini.¹⁴⁵ Aspek-aspek yang telah disebutkan terdapat di Sabang. Transportasi laut berkembang pesat, seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan dan industri. Aspek inilah yang menyebabkan transformasi kehidupan masyarakat Sabang menjadi sebuah kota pelabuhan yang modern serta kosmopolitan. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan menyajikan proses historis keberadaan kota pelabuhan Sabang yang modern serta kosmopolitan sejak menguatnya hegemoni Belanda, yakni menjelang akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20.

Pendirian Pelabuhan Sabang pada Akhir Abad XIX

Pulau Weh, tempat keberadaan Pelabuhan Sabang, telah merupakan rebutan antara Inggris dan Belanda sejak abad ke-19. Persaingan dagang antara Inggris dan Belanda diselesaikan dengan Traktat London pada 1824. Akibat traktat tersebut, Belanda memiliki keleluasaan untuk menanamkan hegemoninya di Sumatra, khususnya di Aceh. Ketika Belanda mulai melancarkan ekspansi politik-militer ke Aceh pada 1870-an,

Pulau Weh merupakan salah satu sasaran yang tidak luput. Pulau ini diambilalih oleh Belanda dalam perang menaklukkan Aceh pada 1877. Setelah itu, pada 1884, sebuah toko batu bara (*kolenopslagplaats*) didirikan di Teluk Balohan yang berada di selatan Pulau Weh. Pendirian toko batu bara ini mendorong eksplorasi lebih lanjut atas potensi yang ada di Pulau Weh.¹⁴⁶

Tidak lama berselang, Pelabuhan Sabang didirikan pada 1887. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan sebuah stasiun pengolahan batu bara (*coaling station/kolenstation*) di Teluk Sabang yang diinisiasi oleh Firma de Lange & Co. dari Batavia dan dibantu oleh *Nederlandsche Handels Maatschappij/NHM* (Perusahaan Dagang Belanda). Selain oleh perusahaan perdagangan, pembangunan Pelabuhan Sabang ini didorong oleh Mayor van Heutz, pemimpin pasukan Belanda dalam Perang Aceh yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Van Heutz setidaknya telah mendorong lahirnya delapan pelabuhan bebas di sepanjang pesisir Aceh. Tidak hanya pelabuhan, daerah pedalaman (*hinterland*) sebagai penyokong daerah pesisir (pelabuhan) juga dikembangkan. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara daerah pedalaman dan pesisir menjadi semakin terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang mapan secara berkelanjutan.¹⁴⁷

Alasan Pendirian dan Pengembangan Pelabuhan Sabang

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengembangan Pelabuhan Sabang ini didasarkan pada “situasi yang menguntungkan” yang dimiliki Sabang terhadap lalu lintas maritim dunia, yakni berada di pintu masuk Selat Malaka. Oleh

¹⁴⁴ Bambang Triatmodjo, *Pelabuhan*, (Yogyakarta: Beta Offset, 1996), hlm. 2.

¹⁴⁵ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2020), hlm. 17-19.

¹⁴⁶ M.G. de Boer, *Zeehaven en Kolenstation Sabang 1899-1924*, (Amsterdam: L. van Leer & Co., 1924), hlm. 5-6.

¹⁴⁷ Wouter Cool, *Netherlands East Indian Harbours*, (Batavia: Department of Public Works, 1920), hlm. 54-55.

sebab itu, stasiun pengangkutan serta pelabuhan menjadi sarana penting untuk muali dikembangkan lebih lanjut. Pembangunan diawali dari kawasan Teluk Sabang yang meliputi tempat akomodasi untuk kapal tanpa adanya bendungan atau pemecah gelombang sejenis. Hal ini menegaskan kembali situasi yang menguntungkan tersebut, bahwa kondisi geografis Sabang terbilang “unik”, yaitu memiliki “pelindung alami” terhadap gelombang besar dan angin yang berbahaya bagi pelabuhan serta kapal-kapal yang hendak bersandar dan berlayar.¹⁴⁸

Keunggulan Sabang juga diungkapkan oleh Antoine Cabaton. Ia menjelaskan bahwa Sabang merupakan negeri yang kaya akan lada. Selain itu, Sabang juga merupakan rute terpendek dengan pelabuhan yang diperlukan untuk wisatawan melalui jalur laut ke Eropa, Amerika Utara, Singapura, dan seluruh bagian Timur Jauh (Asia Timur). Teluk Sabang memiliki kondisi geografis yang menguntungkan, yakni jalan masuk hampir 800 meter dengan tempat berlabuh hampir 1,6 kilometer panjangnya dan lebih dari 800 meter lebarnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pelabuhan ini dapat diakses tidak hanya oleh kapal-kapal pedagang, tetapi juga kapal-kapal perang.¹⁴⁹ Senada dengan hal itu, Wouter Cool bahkan menyebut bahwa setidaknya 25 kapal kecil atau 12 kapal besar dapat menambatkan jangkarnya atau bersandar di sana.¹⁵⁰

C. Lekkerkerker juga melukiskan keindahan Pelabuhan Sabang di Pulau Weh. Dengan kondisi geografisnya yang strategis, pelabuhan ini hanya “membutuhkan sedikit peralatan dermaga untuk menyediakan akomodasi yang diinginkan dan tempat berlabuh yang

sepenuhnya aman bagi kapal-kapal besar.” Ia juga menegaskan pentingnya Pelabuhan Sabang bahwa Sabang merupakan pelabuhan perdagangan yang menghubungkan Sumatra bagian utara dengan jalur perdagangan dari Terusan Suez hingga ke Asia Timur. Meski bukan merupakan “Singapura kedua”, Sabang memiliki prospek yang meyakinkan untuk dapat dikembangkan sebagai kota pelabuhan dan perdagangan yang dapat menyerupai Singapura.¹⁵¹

Pengembangan Sabang sebagai Kota Pelabuhan

Setelah 1887, Sabang mulai dikembangkan sebagai kota pelabuhan yang mapan. Hal ini ditandai dengan berdirinya pemerintahan melalui penempatan pegawai urusan dalam negeri (*binnenlandsch bestuur*) pada Desember 1892 serta penempatan armada militer pada Februari 1893. Selanjutnya, pada November 1895, kapal uap bernama “Sumatra” untuk pertama kalinya menurunkan muatannya di dermaga Pelabuhan Sabang.¹⁵² Di sini mulai terlihat peran perusahaan kapal uap (*stoomvaart maatschappij*) Belanda dalam perkembangan Sabang.

Salah satu perusahaan kapal uap yang berperan penting di Pelabuhan Sabang adalah *De Stoomvaart Maatschappij “Nederland”*. Perusahaan pelayaran dengan armada kapal uap ini melayani rute perjalanan yang melewati sejumlah pelabuhan internasional terkemuka, seperti Amsterdam, Southampton, Port-Said, Kolombo, Sabang, Deli, Singapura, Batavia,

¹⁵¹ C. Lekkerkerker, *Land en Volk van Sumatra*, (Leiden: N.V. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill, 1916), hlm. 293.

¹⁵² Anonim, *Sabang Baai op het Eiland Poeloe Weh: De Nieuwe Aanleghaven van de Mailbooten der Stoomvaart Maatschappij “Nederland”*, (Amsterdam: De Bussy, 1903), hlm. 8-10.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁴⁹ Antoine Cabaton, *Jawa, Sumatra, dan Kepulauan Lain di Hindia Belanda*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 335.

¹⁵⁰ Cool, *loc.cit.*

Semarang dan Surabaya. Dengan armada kapal uapnya, perjalanan Amsterdam-Batavia dapat ditempuh hanya dalam waktu satu bulan.¹⁵³

Sejumlah infrastruktur dikerjakan untuk mendukung kota pelabuhan Sabang. Pada 1896, dua panggung pendaratan (*landingstages*) telah dibangun sebagai sarana mengisi bahan bakar kapal uap berupa batu bara. Dua tahun kemudian, sebuah dermaga terapung dengan kekuatan mengangkat beban mencapai 2.600 ton didatangkan dari Surabaya ke Sabang.¹⁵⁴ Pada tahun yang sama, *Naamlooze Vennootschap Zeehaven en Kolenstation Sabang* (Perseroan Terbatas Pelabuhan Laut dan Stasiun Batu Bara Sabang, yang kemudian dikenal sebagai “Perusahaan Sabang”), di bawah manajemen NHM, didirikan untuk mengambil alih pengelolaan pelabuhan dari Firma de Lange & Co.¹⁵⁵ Memasuki awal abad ke-20, tepatnya pada 1901, Pelabuhan Sabang resmi menjadi “pelabuhan bebas” dan terlepas sepenuhnya dari NHM.¹⁵⁶

Perkembangan hingga Pertengahan Abad XX

Memasuki abad ke-20, pertumbuhan yang nyata atas pelabuhan ini mulai terjadi sejak 1903. Sejumlah pekerjaan pelabuhan (*havenwerken*), bengkel, dan bangunan mulai dibangun, untuk mengimbangi lalu lintas perdagangan yang semakin meningkat. Pekerjaan pelabuhan ini yang meliputi pengangkutan batu bara, bongkar muat barang, penyimpanan di gudang, dan sebagainya dikerjakan oleh Perusahaan Sabang. Tidak hanya itu, pertokoan, perkantoran, hotel, dan sebagainya juga dibangun oleh perusahaan ini untuk

menunjang kegiatan perekonomian di kota pelabuhan yang ramai ini. Pekerjaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Sabang pun beralih ke pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1911.¹⁵⁷

Industri batubara dan pelayaran adalah urat nadi kesejahteraan Sabang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah impor dan ekspor batu bara yang meningkat setiap tahunnya, seperti 420.000 ton pada 1912 menjadi 450.000 ton pada 1913. Meletusnya Perang Dunia I pada 1914 menyebabkan penurunan jumlah impor dan ekspor batu bara di Sabang menjadi hanya 268.000 ton pada 1915. Selain batu bara, jumlah kapal yang bersandar beserta berat muatannya bergerak cukup fluktuatif. Misal, dalam rentang satu windu (1910-1918), jumlah kapal bersandar terbanyak sebesar 1.061 pada 1913 dengan total berat muatan sebesar 5.874.000 meter kubik. Akibat Perang Dunia I, jumlah kapal beserta berat muatan mengalami penurunan menjadi hanya 479 kapal yang bersandar dengan total muatan 1.091.000 ton pada 1918.¹⁵⁸

Penjelasan di atas memperlihatkan denyut perekonomian kota pelabuhan Sabang yang ramai. Hal ini ditegaskan oleh Djamaluddin bahwa Pelabuhan Sabang yang pada awalnya hanya dikembangkan sebagai tempat pengisian bahan bakar batu bara pada kapal uap dalam perkembangannya menjadi “area perdagangan” yang penting dan sibuk pada waktu itu.¹⁵⁹ Senada dengan hal itu, Cool menyatakan bahwa dibandingkan dengan kota pelabuhan lainnya, Sabang memiliki keunikan tersendiri, terutama dalam perannya yang begitu penting dalam lalu lintas perdagangan internasional. Oleh sebab itu, ia mengklasifikasikan Pelabuhan

¹⁵³ J.F. Niermeyer, *De Oost en de West: Een Overzicht van de Landen en Volken der Nederlandsche Kolonien*, (Den Haag: J.B. Wolters, 1920), hlm. 131.

¹⁵⁴ Cool, *loc.cit.*

¹⁵⁵ De Boer, *op.cit.*, hlm. 8-9.

¹⁵⁶ Lekkerkerker, *loc.cit.*

¹⁵⁷ Cool, *op.cit.*, hlm. 55-56.

¹⁵⁸ Cool, *op.cit.*, hlm. 57.

¹⁵⁹ Djamaluddin, *Pelabuhan Bebas Sabang 1969: Sebuah Supplement terhadap Pelabuhan Bebas Sabang 1967*, (Banda Aceh: Fak. Ekonomi Universitas Sjah Kuala, 1970), hlm. 6-7.

Sabang sebagai pelabuhan yang dibedakan dari tujuh pelabuhan besar di Hindia Belanda pada waktu itu, yakni Tandjong Priok (Batavia), Surabaya, Semarang, Tjilatjap, Makassar, *Emmahaven* (Padang), dan Belawan (Deli).¹⁶⁰

Pelabuhan Sabang merupakan satu dari tiga pelabuhan besar di Sumatra yang berperan penting dalam lalu lintas perdagangan internasional, di samping *Emmahaven* dan Belawan. Pelabuhan Sabang memiliki keterkaitan erat dengan Pelabuhan Belawan. Setelah Pelabuhan Belawan dibuka pada 1921, sebagian besar kapal bersandar dan menurunkan muatannya di sana. Meski demikian, salah satu keunggulan Pelabuhan Sabang adalah biaya pemeliharaannya yang terbilang murah dibanding Belawan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Sabang yang strategis, dibanding Belawan yang memerlukan biaya besar untuk mengeruk teluk di sana agar kapal-kapal besar dapat bersandar.¹⁶¹

Kejayaan Pelabuhan Sabang tidak bertahan lama. Memasuki 1942, Perang Dunia II berkecamuk. Jepang berusaha menghancurkan kekuatan Barat di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk di Hindia Belanda. Tentara Jepang pun mulai menyerang wilayah Hindia Belanda, salah satunya Aceh dan Sabang. Akibat serangan ini, kota pelabuhan Sabang menjadi porak poranda atau rusak berat. Jepang pun menutup kota perdagangan dan pelabuhan bebas itu sejak menundukkannya hingga kemudian direhabilitasi pasca-Indonesia merdeka.¹⁶²

Penutup

Sabang merupakan wilayah dengan kondisi geografis yang strategis, yakni berada di jalur perdagangan internasional terkemuka sejak dahulu, Samudra Hindia dan Selat Malaka. Dengan keuntungan demikian, Sabang telah menjadi incaran bangsa asing, di antaranya Inggris dan Belanda. Setelah Traktat London ditandatangani pada 1824, Belanda menjadi lebih leluasa dalam menanamkan hegemoninya di sana, yang mana berkaitan erat dengan penaklukan Aceh sejak menjelang akhir abad ke-19 hingga memuncak ketika memasuki abad ke-20. Pada periode ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda menaruh perhatian besar terhadap Sabang. Hal ini tidak lain didasarkan pada sejumlah keuntungan geografis yang dimiliki Pulau Weh. Sabang yang pada dasarnya merupakan sebuah teluk dinilai memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan teluk lain di pulau tersebut. Oleh sebab itu, sebuah pelabuhan pun dibangun di sana pada 1887 yang diinisiasi oleh perusahaan dagang Firma de Linge & Co. bersama NHM.

Menjelang akhir abad ke-19, sejumlah hal dilakukan untuk mengembangkan kota pelabuhan Sabang, mulai dari struktur pemerintahan, militer, serta infrastruktur yang mapan. Terkait infrastruktur, *Naamlooze Vennootschap Zeehaven en Kolenstation Sabang* didirikan pada 1898. Perusahaan inilah yang mengemban sejumlah pekerjaan pelabuhan, juga pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan. Tidak hanya soal infrastruktur, perkembangan kota pelabuhan Sabang juga didukung oleh keberadaan perusahaan kapal uap, salah satunya *Stoomvaart Maatschappij "Nederland"*. Oleh karena itu, industri batu bara yang memenuhi kebutuhan bahan bakar armada pelayaran kapal uap

¹⁶⁰ Cool, *op.cit.*, hlm. 7, 54.

¹⁶¹ Henri Zondervan, *Insulinde in Woord en Beeld: De Sabanghaven op Poeloe Weh – Sumatra*, (Den Haag: J.B. Wolters, 1924), hlm. 20.

¹⁶² Djamaluddin, *loc.cit.*

merupakan pusat denyut nadi perekonomian Sabang. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Pendudukan Jepang pada 1942, atau pada pertengahan abad ke-20, memporakporandakan serta

menutup kota pelabuhan yang telah mapan itu, yang mana kota tersebut kemudian berusaha bangkit kembali setelah Indonesia merdeka.

Joshua Jolly SC. Adalah Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

BERRU NI RAJA ENGKET MANUK GURBA SIPITU TAKAL

Cerita rakyat masyarakat Pakpak ini berkisah tentang seorang pemuda tampan yang mahir memainkan seruling. Pemuda yang hidup sebatang kara ini snantiasa berkelana dari satu desa ke desa yang lain. Suatu hari sampailah pemuda ini di sebuah muara sungai yang mempunyai tiga cabang. Ketika memilih salah satu cabang arus sungai untuk diikuti ternyata ia telah memasuki area terlarang yang merupakan tempat mandi seorang Putri Raja, namun karena ketampanan dan kemahirannya memainkan seruling sang Putri pun jatuh hati dan mereka pun menikah. Kemewahan dan kemegahan yang didapat si Pemuda karena menikahi sang putri justru kemudia merubah pribadi sang pemuda menjadi buruk. Akibatnya sang Putri memutuskan untuk memanggil burung peliharaannya yang berkepala tujuh untuk menjemputnya sehingga tinggalah si pemuda dengan penuh penyesalan. Setiap merasa rindu pemuda tersebut akan memainkan serulingnya dan si Putri akan muncul bersama sang Burung Gurba namun mereka tidak turun melainkan hanya hinggap di ranting pohon. Pada saat itulah sang pemuda berusaha membuju sang Putri namun tidak pernah berhasil. Kejadian ini terus berulang hingga sang Putri merasa Lelah dan berpesan “Suamiku tercinta, apa boleh buat sudah nasib dan rejeki badan kita berpisah, mulai saat ini ketika engkau rindu padaku, carilah *nyiur keppal*, *nyiur gading* dan *nyiur ijo* dan minumlah airnya sebagai penawar rindumu dan ketika engkau sakit buatlah buahnya sebagai obat.” Sampai sekarang tiga buah ini masih sering dipakai masyarakat Pakpak sebagai ramuan obat-obatan.

Najolo Lot kin ngo sada kalak daholi roh i kecundetennai, Maholi kalohon janah sipande-pande ngo en. Nai laos mo daholi en merdalan mengekutken sada lae mengalir nalako menulusi sada kuta. Nai soh mo ia mi sada bekkas idah ia mo tellu keppe takal lae ndai.

Marsak mo daholi, apina ngo ekutenenku katena. Itengen ia kan kumuhun mbersih janah manum mbue bulung bulung, kantengah idah ia meletuk cituk, kan kambirang mbara warnana. Jadi ipilih ia mo mengekutken sikan tengah kerna idah ia meletuk tandana jelma lot meridi ijulu.

Ibuat iamo sada bulu nalako mahan sulingna, lejja kessa ia merdalan meradi mo ia janah ninganna ipekade mo sulingna. Enggo kessa merdalan ia tah piga ari soh mo ia misada tapin tapi oda ngo ibettah i peridiin berru ni raja ngo i. Nai ciboni ngo daholi ndai kipema ise ngo ndia si meridi isen katena.

Ikepar tapin lot ngo sada kuta na meriah kalohon, janah iperentah sada raja sitermurmur, i kerajaen en lot ngo sada

berru ni raja na bagak kalohon, gedang bukna, pekilakona pe mahan sitirun.

Berkat mo berru ni raja en lako meridi mi tapin bekkas daholi ndai ciboni, soh kessa ia menter mo keluar daholi ndai ibagas percibonien nai, tersengget mo berru ni rajai, kumerna oda kin ngo pang roh mi tapin i. Nai kirana mo daholi I nina mo “sentabi turang ise ngo ke, janah kade gelar kuta en..?”

“ise ngo pana ko asa berani ko roh mi bekkas tapinkuen” alus berruni raja i.

“lakum aku perdalani ngo turang naing kateku singgah I kuta ndene en” nina sidaholi en mo.

Nai ipeterrang berru ni raja en mo karina, janah iembah mo daholi i mikuta misapo partuana. Nai bagimo, engo mo tah piga minggu tading daholi en I kutai, janah gaji-gajien mo ia rebbak deba, enggo kessa tengah berngin lalap ngo dak ipesora ia sulingna ndai, bagak kalohon ngo sora sulingna i, sennang ngo karina perkuta i megeken sora serulingna i, janah pulung-pulung ngo dak simerbaju engket anak perana ninganna menu tu page.

Bagi mamu berru ni raja i oda kessa i begge ia sora suling daholi ndai oda ngo terpeddem ia, janah ngati ngo ia teddoh mengidah daholi ndai. Raja ni kuta i peng tong ngo pana iperateken daholi ndai, idah ia mo mendena pekilakona engket rajinna kerejo daholi ndai, singkat ni cerita, ipesaut ia mo berruna ndai engket daholi i, nai ibaing mo pestana meriah kalohon, pituari pitu berngin mo i baing pesta ni, janah i seat mo pitu kerbo, iberre raja i mo sabah, sapo, pinakan engket hartana sitengah mendahisa.

Tapi enggo kessan piga-piga bulan merubah mo pekilako daholi i, gabe perjodi-jodi ngo ia janah pemabuk, mela ngo i akap berru ni raja i menengen jelma nterrem, enggo mo tah piga kali ipesenget ia daholina I asa mobah, tapi odah ngo meut, malah makkin merajalela, kumerna enggo melasu engket ciona ukur berru nirajai, tutusmo pana ukurna menadingken daholina i.

I tenggoi ia mo manuk-manuk simergelar "Sigurba Gurba Sipitu Takal" I delleng nai, mbelgah kalohon ngo manuk-manuk nai, nai menangkik mo berru ni raja i mi babo manuk-manuk i, isuruh mo kabang merembah ia mi dates, tapi madeng daoh kabang, I begge beru ni raja i mo sora seruling ni daholi na ndai, menter ndabuh mo perasaanna, ipesulak ia mo susur turun manuk-manuk nai, janah seggep mo i dates neur keppel, idah ia mo daholi na ndai pesoraken seruling, ielek daholini mo ia asa turun mi teruh, tapi oda ngeut berru ni raja i.

Nai isuruh berru raja i mo mulak kabang manuk-manuk nai, tapi ideng ngo i pertengahen delleng mulak mo i begge ia mersora suling ni daholina ndai, roh ma

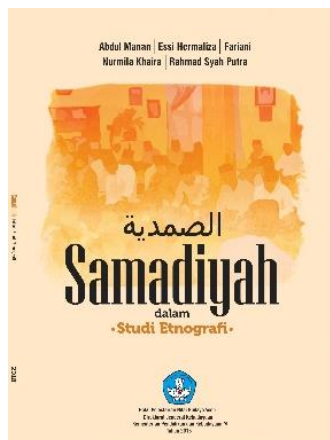
mo menter nteddohna midah daholina ndai, tong mamu i suruh ia turun manuk-manuk sigurba-gurba sipitu takal ndai turun. Seggep mo i dates neur gading, i tatap ia mo daholi na ndai. Tong ngo i suruh ia susur, tapi oda ngo ue ia, puas kessa nteddohna mendahi daholi na ndai, mulak mamu i suruh kabang manuk-manuk ndai.

Nai ideng ma ngo ia i punca delleng roh mo tenggo-tenggo sora seruling ni daholi na ndai, tong ma isuruh ia turun manuk-manukna ndai, janah seggep mi babo neur ijo, nai kirana mo ia i tenahi daholina i nina mo: "ko ale turang tampuk ni pusuhku, tading mo ko laos mo aku, janah enget mo molo nteddoh kono bangku, pangan mo janah enum mo buah neur sini seggepen manuk-manuk en, molo magin ngo ko buah neur en mo baing gabe pinatunna"

Enggo kessa i tenahi menter mo kabang manuk-manuk ndai dekket berru ni raja I oda nenge teridah. Nai tading mo mulak mbalnung daholi ndai, raja ni kuta ipe melaga ngo bana, janah i pelaus ngo ia kan kuta inai.

I asa soh bagendari pe buah neur Keppel, neur gading engket neur ijo ibaing kalak ngo gabe pinantun menambari kalak si mersakit.

Sumber Cerita: "Kumpulan Cerita Rakyat Pakpak" (Editor : Dina L.Tobing, Sonti Banurea, dan Muda Banurea)



TERBITAN

Dari
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
ACEH**

Samadiyah dalam Studi Etnografi, Abdul Manan, dkk., Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2018, 217 halaman + xiv.

Samadiyah adalah salah satu bagian penting dari upacara terkait kematian di Aceh. Samadiyah sepadan dengan istilah tahlilan pada masyarakat di luar Aceh yaitu tradisi doa bersama yang diperuntukkan kepada orang yang telah meninggal. Perbedaannya, dalam samadiyah lebih diperbanyak bacaan surat Al-iklas hingga 33-100 kali. Samadiyah juga diikuti dengan sejumlah kenduri dari pihak keluarga. Kenduri inilah yang kemudian dihiasi dengan berbagai tradisi yang mengandung nilai-nilai filosofis yang secara tidak langsung memberi pengaruh kepada orang yang didoakan di alamnya dan memberi pesan pula bagi orang-orang yang masih hidup. Sedikitnya, hal itulah yang akan dipahami ketika buku dengan sampul berwarna jingga ini dibaca.

Selain doa yang dikirimkan kepada almarhum yang akan menempuh jalan panjang menemui Sang Maha Kuasa, upacara ini mengandung simbol-simbol filosofis yang akan mengantar pembaca untuk lebih menghargai kehidupan dan bersiap untuk kematian. Semua dipaparkan secara rinci di setiap halaman.

Baca informasi lebih lengkap pada buku dimaksud. Mudah saja, buku Samadiyah dalam Studi Etnografi ini dapat diakses di perpustakaan daerah terdekat di kota anda atau silahkan kunjungi Perpustakaan Chik Kuta Karang Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh di Banda Aceh.